



RPJM DESA PERIODE 2022 - 2027

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
PERIODE 2022 - 2027**



CONTACT

PHONE:
082321455536

WEBSITE:
WWW.DUKUHDALEM.ORG

EMAIL:
dukuhdalem@gmail.com

DESA : DUKUHDALEM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT
TAHUN : 2022



RPJM DESA PERIODE 2022 - 2027

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
PERIODE 2022 - 2027**



CONTACT

PHONE:
082321455536

WEBSITE:
WWW.DUKUHDALAM.DRC

EMAIL:
Dukuhdalem.japara2@gmail.com

DESA : DUKUHDALAM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT
TAHUN : 2022

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Dukuhdalem .

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi serta religiusitas, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 5 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Dukuhdalem. Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-

rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Dukuhdalem, 28 Februari 2022

Kepala Desa Dukuhdalem



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Dasar Hukum	5
1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa	8
BAB II. PROFIL DESA	10
2.1 Kondisi Umum Desa	10
2.1.1 Sejarah Desa	10
2.1.2 Kondisi Geografis Desa	12
2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa	14
2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa	15
2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa	16
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa	16
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa	16
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	17
BAB III. VISI DAN MISI	18
3.1 Visi	18
3.2 Misi	18
BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA	20
4.1 Masalah	20
4.2 Potensi	29
BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	31
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	31
5.2 Program Pembangunan Desa	33
5.3 Strategi Pencapaian	37
5.4 Arah Kebijakan Keuangan	39
BAB VII. PENUTUP	40

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa
20. Notulen Musyawarah Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dukuhdalem tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
22. Peta Desa
23. Foto Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) setelah ditetapkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemd) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. **Pemberdayaan** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. **Partisipatif** yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. **Berpihak** pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. **Terbuka** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalian informasi** yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Dukuhdalem tahun 2022 - 2027, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Dukuhdalem sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Dukuhdalem tahun 2022 – 2027 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Dukuhdalem atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan

program 2022 – 2027 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Dukuhdalem dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Dukuhdalem dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Desa Dukuhdalem maupun masyarakat umum.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJM Desa Dukuhdalem Tahun 2022 – 2027 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari PAD, ADD, BHPR, BKP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Dukuhdalem.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dukuhdalem tahun 2022 – 2027 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang di dalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang

berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.

6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Dukuhdalem tahun 2022 – 2027 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.3. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dukuhdalem Tahun 2022 – 2027 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- s. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 melalui anggaran dan belanja Desa;
- t. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- u. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- v. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- w. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- x. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- y. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019)
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 8);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 9);

- cc. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 44 Nomor 2017); dan
- dd. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 49);
- ee. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- ff. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Kuningan;
- gg. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- hh. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- ii. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- jj. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kuningan;
- kk. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 6).

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

Proses Penyusunan RPJMDesa di Desa Dukuhdalem berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1.4.1. Persiapan

Pada tahap persiapan yang harus dilakukan adalah :

- a. Sosialisasi rencana penyusunan RPJMDes
- b. Pembentukan tim penyusun RPJMDes
- c. Pembekalan tim penyusun RPJMDes

1.4.2. Pelaksanaan Penyusunan RPJM Desa

1. Musyawarah Dusun (Musdus)

Musyawarah dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali permasalahan dan potensi di tingkat dusun. Untuk menggali masalah dan potensi yang ada dapat menggunakan

beberapa methodologi yang memang sudah akrab dengan masyarakat Desa misalnya PRA dalam musyawarah dusun yang dapat tergalinya masalah dan potensi yang berkaitan dengan hak dan dasar warga negara, kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

2. Lokakarya Desa

Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat desa untuk membahas hasil musyawarah dusun di tingkat desa. Materi yang dibahas dalam lokakarya adalah sebagai berikut :

- a. Pengelompokan masalah dan potensi hasil musyawarah dusun
- b. Menyusun sejarah pembangunan Desa
- c. Menyusun visi dan misi Desa
- d. Membuat prioritas masalah
- e. Menentukan alternatif tindakan pemecahan masalah
- f. Menyusun arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa
- g. Menyusun matrik kegiatan RPJMDes
- h. Menyusun draft naskah RPJMDes

3. Musyawarah Pembangunan Jangka Menengah Desa

Musrenbang jangka menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMDes diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan Desa dan mengikutsertakan masyarakat.

Musyawarah ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dan menyepakati hasil lokakarya Desa.

3.1.1. Penetapan Rencana

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Pasal 64 ayat (2) disebutkan bahwa RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan Desa. Penetapan Peraturan Desa tentang RPJMDes tentunya melalui pembahasan dan persetujuan bersama BPD.

3.1.2. Sosialisasi RPJM Desa

Dalam peraturan pemerintah nomor 72 Pasal 60 ayat (3) disebutkan bahwa peraturan desa ada peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh pemerintah desa. Karena RPJMDes merupakan peraturan Desa maka perintah des mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikannya kepada kserta

2.1. KONDISI UMUM DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Dalam rangka pemerataan pembangunan di segala bidang baik fisik maupun mental spiritual, serta meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, maka timbulah suatu pemikiran dari tiap lembaga dan para tokoh masyarakat serta tokoh agama yang ada pada waktu itu, maka sudah waktunya dan dipandang perlu Desa Sindangbarang dibagi 2 (dua) atau dipekarakan.

Maka setelah melewati pengajuan serta proses oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, maka pada tanggal 8 Nopember 1982 terjadilah Desa Sindangbarang dipekarakan menjadi 2 (dua) yaitu blok wage dijadikan wilayah pemekaran.

Adapun nama Desa dikarenakan pada waktu itu ada 3 tokoh yang memberikan nama Desa baru atau Desa Pemekaran yaitu :

1. Abah Kuwu Aceng (Mantan Kepala Desa Sindangbarang) memberi nama Dukuhdalem;
2. Abah Umi Sepuh (Mantan Raksa Bumi Desa Sindangbarang) memberi nama Mekarjaya dan;
3. Bapak Sulaiman (Kepala Desa Sindangbarang) memberi nama Sindangmekar.

Dengan memberi alasan masing-masing.

Dikarenakan ada 3 tokoh yang memberi nama Desa yang baru dan nama desanya juga berbeda, maka sepakat diadakan pengundian yang bertempat di SD Cantilan (yang saat ini SD Dukuhdalem) dengan cara dikocok oleh Panitia Pemekaran dengan keputusan nama Desa apa saja yang pertama keluar itulah yang dijadikan nama pemekaran, ternyata setelah diundi yang keluar pertama itu Dukuhdalem, akhirnya Panitia memutuskan Desa pemekaran yaitu Desa Dukuhdalem.

Arti dari pada Desa Dukuhdalem menurut cerita Abah Kuwu Aceng adalah :

Dukuh artinya Dusun /tempat Dalem artinya Pejabat / Gegeden. Jadi Dukuhdalem artinya Dusun/ tempat para Gegeden yang tadinya tidak ada pejabat Pemerintahan sekarang ada. Adapun pengambilan nama Dukuhdalem menurut Abah Kuwu Aceng yang memberikan nama Desa, mengambil dari suatu tempat yang ada di Dusun II yang pada waktu itu disebut blok wage.

Konon ceritanya, bahwa Blok Wage itu ada suatu tempat yang penuh dengan pepohonan besar kemudian ditengahnya ada kolam, sehingga tempat tersebut menjadi rindang dan sejuk, konon ceritanya pada zaman belanda penjajah

tempat tersebut suka dijadikan tempat pakoasi/mengungsi oleh para Gegeden dari Cirebon disamping aman tempatnya juga rindang dan sejuk, bahkan tempat tersebut sampai sekarang apabila dibulan maulid masih ada yang suka berkunjung khususnya dari Daerah Cirebon Girang entah tujuannya apa Abah juga tidak tahu, sebab tempat tersebut tidak ada yang dikeramatkan/kuburan, yang ada hanya pepohonan besar, kolah dan mata air juga tempat tersebut sekarang tidak terurus lagi yang berada di Dusun II kurang lebih 800 m, sebelah utara dari balai Desa.

Desa Dukuhdalem disyahkan Bupati Kuningan pada tanggal 11 September 1982 bersama Desa Linggasana, Lingga Indah dan Babakan Mulya bertempat di Desa Linggasana Kecamatan Cilimus.

Demikianlah sejarah singkat lahirnya Desa Dukuhdalem, yang berada di Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan dikutip dari hasil wawancara dengan Abah Kuwu Aceng oleh Bapak Bunyamin (Kepala Desa Dukuhdalem) pada tanggal 1 Agustus tahun 1983 untuk diingat dan diketahui.

Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No	Nama	Jabatan	Dari tahun s.d tahun
1.	Karta Hamid	Pejabat Kepala Desa	1982 – 1986
2.	Bunyamin	Kepala Desa	1986 – 2010
3.	Nana Usnadi	Juru Tulis	1982 – 1992
4.	Walsim	Ngalambang	1982 – 1999
5.	Amadisastra	Ketib	1982 1992
6.	Salim	Raksabumi	1982 – 1992
7.	Karnen	Raksabumi	1993 – 1999
8.	Kasna	Lulugu	1982 – 1992

Dalam rangka untuk memudahkan pengurusan di Desa Dukuhdalem Panitia Pemekaran beserta para tokoh masyarakat dan warga masyarakat pada waktu itu mengadakan musyawarah yang akhirnya memutuskan bahwa Desa Dukuhdalem dijadikan tiga wilayah bagian blok yaitu :

1. Blok dinamakan Dusun I
2. Blok dinamakan Dusun II
3. Blok dinamakan Dusun III

Sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman serta perkembangan kemajuan untuk membantu Kuwu (Kepala Desa) dalam melaksanakan pemerintahan maka Kepala Desa mengangkat perangkat desa yaitu :

1. Ngabihi sebagai wakil Kepala Desa
2. Juru Tulis bertugas mengatur dan emngerjakan administasi Desa
3. Raksa bumi bertugas mengatur masalah pertahanan dan pertanian

4. Lulugu sebagai Kepala Polisi Desa bertanggungjawab atas keamanan Desa
5. Cap Gawe mengurus dan mengatur keadaan perjalanan desa
6. Ngalambang mengatur dan mengurus tentang kependudukan dan pembangunan Desa
7. Ketib mengurus dan mengatur masalah Kependudukan lahir, mati dan agama serta kesejahteraan rakyat.

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

Desa Dukuhdalem merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan, yang berada pada ketinggian 470 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah 205,45 Ha, dengan peruntukkan sebagai berikut:

Tabel 1
Luas wilayah Desa Dukuhdalem

NO	URAIAN	LUAS (M ²)
1	Permukiman	25 Ha
2	Persawahan	10 Ha
3	Perkebunan/Tegalan	161 Ha
4	Hutan	
5	Perkantoran pemerintah	0,22 Ha
6	Lapangan olahraga	0,36 Ha
7	Tempat pendidikan/sekolah	0,02 Ha
8	Pasar	-
9	Pemukaman umum	1,6 Ha

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2017

Batas wilayah administrasi pemerintahan Desa Dukuhdalem adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Singkup
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Rajadanu
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sindangbarang
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ciniru

2.1.3. Kondisi Demografis

Secara umum Desa Dukuhdalem merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Japara terletak pada ketinggian 470 M dari permukaan laut. Suhu rata-rata harian mencapai 25 – 32°C kelembaban udara mencapai 32°C dan curah hujan rata-rata 3.000 – 3.200, mm/tahun sedangkan jarak orbitasi jarak ke ibu kota Kecamatan 2 Km. Jarak ke ibu kota Kabupaten 12 Km, jarak ke Ibu kota Provinsi 250 Km dan jarak ke ibu kota Negara 350 Km.

Perkembangan kependudukan di Desa Dukuhdalem secara umum dari tahun- ke tahun selalu menunjukkan peningkatan walaupun tidak signifikan, sampai dengan akhir tahun ini jumlah penduduk Desa Dukuhdalem sebanyak 2.385 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.265 jiwa dan perempuan 1.120 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 734 Kepala Keluarga (KK).

Dengan Batas-Batas Desa Sebagai Berikut :

- a. Sebelah Barat : Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana
- b. Sebelah Timur : Desa Rajadanu Kecamatan Japara
- c. Sebelah Selatan : Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana
- d. Sebelah Utara : Desa Singkup Kecamatan Japara

Jumlah penduduk Desa Dukuhdalem 2.385 orang, terdiri atas :

- laki-laki : 1.265 orang
- perempuan : 1.120 orang

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Dukuhdalem
Berdasarkan Kelompok Umur

No	KELOMPOK UMUR	JUMLAH
1	Muda (0-14)	547
	- Laki-laki	294
	- Perempuan	253
2	Produktif (15-64)	1653
	- Laki-laki	884
	- Perempuan	769
3	Tua (65+)	86
	- Laki-laki	100
	- Perempuan	111
4	Jumlah :	
	- Laki-laki	1.278
	- Perempuan	1.133
	- Total jumlah penduduk	2.385

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2017

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Dukuhdalem
Berdasarkan Mata Pencapaian

No.	Mata Pencapaian Tetap	Jumlah	Keterangan
1.	Pegawai Negeri Sipil	13	
2.	TNI	2	
3.	Wiraswasta / dagang	100	
4.	Tani	276	
5.	Buruh tani	183	
6.	Lain-lain	1.811	

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2017

2.1.4. Kondisi Sosial Budaya Desa

Sudah menjadi tradisi dari semenjak dulu hingga sekarang, bahwa diwaktu akan musim hujan/mangsanya musim hujan/mangsanya musim bercocok tanam, biasanya pada bulan Rewah, sebagian masyarakat Desa Dukuhdalem suka mengadakan/melaksanakan Ziarah ke makam para Bubuyut Desa.

Berangkat ziarah biasanya ada yang suka membawa tumpeng, ada yang membawa senek dan ada juga yang membawa air untuk masak disana, disamping itu ada yang menuntun domba jantan hasil membeli secara patungan. Ziarah di tempat itu diadakan acara tahlilan secara bersama-sama/mengirim bacaan ayat suci Al-Qur'an pada arwah Bubuyut, disamping itu disekeliling kuburan diadakan gerakan kebersihan.

Domba yang telah tersedia yang tadi dituntun saat itulah dipotong lalu disisit/diambil kulitnya lalu dagingnya dimasak/disayur ada juga yang suka memanggang/menyate dan daging/sayur yang sudah matang lalu dibagikan kepada masyarakat yang hadir ditempat itu lalu dimakan dengan tumpeng yang telah tersedia secara bersama-sama.

Nama-nama Bebuyut Desa Dukuhdalem

1. BUYUT : CIHIDEUNG Kuburanya di Desa Cihideung Kec. Cidahu
2. BUYUT : GEDONG Kuburannya di Lampegan Dusun III Desa Dukuhdalem
3. BUYUT : MUALIMKuburannya di Kiara Koneng Desa Japara
4. BUYUT : SAJAM Kuburannya di Dusun II Desa Dukuhdalem
5. DLL.

2.1.5. Kondisi Ekonomi Desa

Secara umum, perekonomian Desa Dukuhdale dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4
Tingkat Produksi Pertanian Desa Dukuhdale

No.	Jenis Produk	Jumlah Produksi (Kwintal/Ha/Tahun)	Keterangan
1.	Padi	2,8 Ton/Ha/Thn	
2.	Jagung	2 Ton/Ha/Thn	
3.	Kedelai	-	
4.	Bawang Merah	-	
5.	Melinjo	2 Ton/Ha/Thn	
6.	Pisang	7 Ton/Ha/Thn	
7.	Petey	4,3 Ton/Ha/Thn	
8.	Ubi Jalar	7 Ton/Ha/Thn	
9.	Ubi Kayu	7 Ton/Ha/Thn	

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2017

Tabel 5
Produk Desa Lainnya

No	Jenis Produk	Jumlah Produksi Per Tahun	Keterangan
1.	Keripik Pisang	775 Kg
2.	Keripik Singkong	700 Kg
3.	Emping Melinjo	200 Kg
4.	Olahan Gadung	250 Kg
5
6
7.	Dst

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2017

2.1.6. Kondisi Infrastruktur Desa

a) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Dukuhdalem sebelum adanya bantuan Dana Desa di antaranya :

- 1) Balai Desa : 1 Buah
- 2) Poskamling : 3 Buah
- 3) Masjid Desa : 1 Buah
- 4) Lapangan Sepak Bola : 1 Buah
- 5) TK : 1 Buah
- 6) SD : 1 Buah
- 7) Setu : 1 Buah
- 8) Jalan Desa : 11 Km
- 9) Jembatan Desa : 3 Buah

b) Sarana dan prasarana yang dibangun dari penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

- 1) Jalan desa : 11 km
- 2) Jembatan : 3 buah
- 3) Unit embung : 1 buah
- 4) Unit drainase dan irigasi : - buah
- 5) MCK : - buah
- 6) Air bersih : - buah
- 7) Posyandu : 3 buah
- 8) Polindes : - buah
- 9) Pasar desa : - buah
- 10) PAUD : 1 buah
- 11) Lainnya :

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dalam rangka untuk memudahkan pengurusan dan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat sejak semula didirikannya Desa Dukuhdalem, diputuskan bahwa Desa Dukuhdalem dijadikan menjadi tiga wilayah bagian blok yaitu :

1. Blok dinamakan Dusun I
2. Blok dinamakan Dusun II
3. Blok dinamakan Dusun III

Dari masing masing-masing blok tersebut memiliki masing-masing nama sebutan sebagai penanda atau identitas kampung. Blok I memiliki nama Blok Buahkate, Dusun II bernama Blok Cantilan dan Blok III bernama Blok Lowakerep.

Disamping Desa Dukuhdalem ini dibagi menjadi 3 Blok, dibagi lagi menjadi wilayah yang lebih kecil yaitu wilayah Rukun Tetangga (RT). Jumlah RT yang terbentuk adalah 11 RT yang dibagi dalam 3 Blok dengan formasi pembagian numeric dari angka 1 sampai angka 11. Adapun RT yang terdapat di Blok I yaitu RT. 001 sampai dengan RT. 004. Di Blok II yaitu RT. 005 sampai dengan RT. 008 dan di Blok III yaitu RT. 009 sampai dengan RT. 011.

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Dukuhdalem Kabupaten Kuningan pada saat ini terdiri dari :

- Kepala Desa : JUHARI
- Ketua Badan Permusyawaratan Desa : ANWASI, S.Pd.I
- Sekretaris Desa : NURDIN, S.Sos.I
- Kaur Umum : SUHARTI
- Kaur Keuangan : DIDI MULYADI
- Kaur Perencanaan : CECEP NUROHIM
- Kasi Pemerintahan / *ngabihi* : MUSA
- Kasi Kesra/*Raksabumi* : SARO SARIPUDIN
- Kasi Pelayanan / *Ketib* : DUDUNG
ABDUROHMAN
- Kepala Dusun/Blok I : M. SALMAN
- Kepala Dusun/Blok II : SARMADI
- Kepala Dusun/Blok III : ARIS MUNAJAT

Untuk lebih jelas struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan dapat dilihat dalam lampiran RPJM Desa ini.

3.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan visi Desa Dukuhdalem ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Dukuhdalem seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Desa dan masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Dukuhdalem adalah :

**“MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIH,
MAJU, AGAMIS, DAN BERKEADILAN”**

3.2. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu upaya-upaya yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan.

Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Dukuhdalem, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Dukuhdalem adalah :

▪ **Misi ke 1 : Bersih**

1. Mengelola keuangan desa yang efektif dan efisien
2. Meniadakan sikap korupsi dan kolusi di tubuh pemerintah desa
3. Melaksanakan pembangunan secara partisipatif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan

▪ **Misi ke 2 : Maju**

1. Melanjutkan dan mengembangkan program-program pemerintahan yang terdahulu
2. Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi kinerja perangkat Desa sesuai dengan jabatan dan fungsinya demi efektivitas pelayanan masyarakat Desa
3. Melaksanakan birokrasi pemerintahan desa yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Optimalisasi pengelolaan asset Desa menjadi potensi penghasilan Desa

5. Mendorong lembaga keuangan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wahana sentral perekonomian masyarakat Desa dan sumber penghasilan Desa.
6. Membentuk, membina dan mendorong kemajuan kelompok-kelompok usaha kecil dan tani
7. Mendorong potensi para pemuda karang taruna
8. Maksimalisasi peran para kader pemberdayaan masyarakat baik PKK, Kader posyandu dan Pengurus Kampung KB
9. Mengembangkan sarana dan prasarana lembaga pendidikan Dasar non formal baik umum ataupun keagamaan.

▪ **Misi ke 3 : Agamis**

1. Mengakomodir dan mendorong kegiatan-kegiatan keagamaan menjadi piranti kemajuan masyarakat dalam bidang keagamaan
2. Mengembangkan lembaga pendidikan dasar keagamaan

▪ **Berkeadilan**

1. Meniadakan sikap nepotisme di dalam lingkungan pemerintahan Desa
2. Persamaan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa
3. Penggunaan anggaran berdasarkan aspek prioritas

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1. MASALAH

Secara umum tinjauan masalah dilihat dari 5 (lima) aspek/bidang utama (sesuai dengan lampiran ketentuan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007, namun untuk mensinergiskan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kuningan maka bidang-bidang tersebut menjadi 28 bidang sesuai dengan kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJM Daerah Kabupaten Kuningan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2
Masalah dilihat dari 5 (lima) aspek / bidang utama (sesuai dengan lampiran ketentuan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007

No	Permendagri No 66 Tahun 2007	No	Perda No 6 Tahun 2009
1	Pendidikan	1	Pendidikan
		2	Perpustakaan
		3	Kepemudaan dan Olahraga
		4	Kebudayaan
2	Kesehatan	5	Kesehatan
		6	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
3	Ekonomi	7	Ketenagakerjaan
		8	Ketahanan Pangan
		9	Pertanian
		10	Perikanan
		11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		12	Perindustrian
		13	Perdagangan
		14	Pariwisata
4	Sarana Prasarana Umum Wilayah	15	Pekerjaan Umum
		16	Perumahan
		17	Lingkungan Hidup
		18	Kehutanan
5	Pemerintahan	19	Sosial
		20	Ketrasmigrasian
		21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		22	Pemberdayaan Perempuan dan

		Perlindungan Anak
	23	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
	24	Komunikasi dan Informatika
	25	Perhubungan
	26	Pertahanan
	27	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	28	Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Penjaringan masalah Desa Dukuhdalem di setiap Dusun terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain :

- 1) Bidang Pendidikan ada 11 masalah
- 2) Bidang Kesehatan ada 7 masalah
- 3) Bidang Perpustakaan ada 3 masalah
- 4) Bidang Keluarga berencana dan keluarga sejahtera ada 2 masalah
- 5) Bidang Ketenagakerjaan ada – masalah
- 6) Bidang Sosial ada 3 masalah
- 7) Bidang Ketransmigrasian ada 1 masalah
- 8) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada 1 masalah
- 9) Bidang Kepemudaan dan Olahraga ada 5 masalah
- 10) Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ada 2 masalah
- 11) Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ada 3 masalah
- 12) Bidang Komunikasi dan Informatika ada 1 masalah
- 13) Bidang Pekerjaan umum ada 5 masalah
- 14) Bidang Perhubungan ada 1 masalah
- 15) Bidang Perumahan ada 1 masalah
- 16) Bidang Pertanahan ada 2 masalah
- 17) Bidang Ketahanan Pangan ada 3 masalah
- 18) Bidang Pertanian ada 6 masalah
- 19) Bidang Perikanan ada 1 masalah
- 20) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ada 3 masalah
- 21) Bidang Perindustrian ada 1 masalah
- 22) Bidang Perdagangan ada 1 masalah
- 23) Bidang Pariwisata ada 1 masalah
- 24) Bidang Kebudayaan ada 1 masalah

- 25) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ada 2 masalah
 26) Bidang Lingkungan Hidup ada 2 masalah
 27) Bidang Kehutanan ada 2 masalah
 28) Bidang Sumber daya mineral ada 2 masalah

Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3 sebagaimana berikut :

Tabel 3
Masalah dan Lokasi Berdasarkan Bidang Kegiatan

No	Masalah	Lokasi
1	Pendidikan	
	1. Perlunya penambahan ruang belajar TK	Dusun I
	2. MDTA belum mempunyai gedung/ruang belajar	Dusun I
	3. Kegiatan pembelajaran belum didukung dengan alat praktek	Dusun I
	4. Belum memiliki lapangan bola voli yang permanen dan status masih kontrak tanah masyarakat/pribadi serta belum sesuai standar kelayakan	Dusun I
	5. Siswa yang berprestasi masih banyak dari golongan keluarga yang lemah secara ekonomi sehingga kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi hingga Universitas relatif sulit	Desa
	6. PAUD/TK/MDTA/SD belum ditunjang oleh ketersediaan sarana dan sarana perpustakaan yang lengkap	Desa
	7. Kesejahteraan guru honor masih rendah	Dusun I
	8. fasilitas penelitian/laboratorium sebagai sarana penunjang pendidikan belum ada	Dusun I
	9. Akses informasi masih manual	Dusun I
	10. SDN belum memiliki sarana peribadahan	Dusun I
	11. fasilitas air bersih MCK SD belum baik	Dusun I
	12. Penjaga sekolah belum memiliki ruangan kerja khusus	Dusun I
2	Bidang Kesehatan	
	1. Tidak semua masyarakat miskin terkaper oleh jaminan sosial/BPJS gratis sehingga menyebabkan ketidakmampuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit secara gratis	Dusun I,II & III
	2. Bayi dan balita serta ibu hamil belum mendapatkan	Dusun I,II &

	bantuan makanan tambahan yang bergizi secara maksimal sehingga menjadi salah satu factor kurang maksimalnya dalam penanggulangan stunting.	III
	3. Pada musim penghujan penyebaran nyamuk meningkat terutama nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah. Persoalan ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang terkena penyakit demam berdarah.	Dusun I,II & III
	4. Minimnya alokasi dana bagi kegiatan kader kesehatan	Dusun I,II & III
	5. Peralatan kesehatan masih kurang lengkap	Dusun I,II & III
	6. Perlu adanya kesadaran hidup sehat pada masyarakat	Dusun I,II & III
	7. Penomena pandemic covid-19 hingga saat ini masih meraja lela.	Dusun I,II & III
	8. Lemahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan minimnya kewaspadaan terhadap penyebaran virus covid-19	Dusun I,II & III
3	Bidang Perpustakaan	
	1. Ketersediaan literature buku bacaan di perpustakaan masih minim	Dusun I,II & III
	2. Minat baca siswa SD masih rendah	Dusun I,II & III
	3. Minat baca dan pengetahuan masyarakat Desa masih rendah	Dusun I,II & III
	4. Perlu adanya sarana dan prasarana perpustakaan bagi remaja masjid dan majelis-majelis ta'lim	Dusun I
4	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
	1. Masih ada usia Tua yang hamil	Dusun I,II & III
	2. Masyarakat terutama pasangan usia subur banyak yang tidak mau ber KB secara rutin	Dusun I,II & III
	3. Belum maksimalnya peran pengurus Kampung KB	Dusun I,II & III
5	Bidang Ketenagakerjaan	

	1. Tidak adanya pusat informasi lapangan pekerjaan	Dusun I,II & III
	2. Pemerintahan desa belum maksimal mengeksplorasi potensi desa dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa	Dusun I,II & III
	3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) belum maksimal dan masih terkesan stagnan untuk menjadi pusat kegiatan perekonomian masyarakat desa dan upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan	Dusun I,II & III
6	Bidang Sosial	
	1. Banyak rumah tangga miskin	Dusun I,II & III
	2. Banyak anggota keluarga yang sulit mencari pekerjaan	Dusun I,II & III
	3. Sarana ibadah belum terawat dengan baik (Dana pemeliharaan tidak memadai)	Dusun I,II & III
	4. Kegiatan-kegiatan sosial keagamaan belum terorganisir dengan baik	Dusun I,II & III
	5. Seiring perubahan kondisi pemerintahan sekarang, rasa gotong royong masyarakat desa semakin memudar	Dusun I,II & III
7	Bidang Ketransmigrasian	
8	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	1. SDM masyarakat desa masih rendah	Dusun I,II & III
	2. Belum maksimalnya pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat	Dusun I,II & III
9	Bidang Kepemudaan Masyarakat Desa	
	1. Belum memiliki fasilitas lapangan bola voli yang permanen dan masih kontrak	Dusun I,II & III
	2. Kegiatan olahraga belum terprogram dengan baik	Dusun I,II & III
	3. Belum ada upaya pengembangan potensi SDA dan SDM untuk menunjang kegiatan pemuda	Dusun I,II & III

	4. Pembinaan kerohanian generasi muda masih lemah dan tidak terkoordinir	Dusun I,II & III
	5. Asset lahan kebun pemuda terlantar	Dusun II
10	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1. Belum ada kegiatan ekonomi yang dimotori perempuan	Dusun I,II & III
	2. Belum maksimalnya peran PKK dan Kader posyandu	Dusun I,II & III
11	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
	1. Sarana pemerintahan desa belum memadai sehingga berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pemerintahan desa	Dusun I
12	Bidang Komunikasi dan Informatika	
	1. Sistem administrasi pemerintahan desa belum keseluruhannya dilaksanakan secara online termasuk di dalamnya pelayanan bagi masyarakat	Dusun I
	2. Belum maksimalnya kelompok masyarakat dan masyarakat desa secara umum dalam pemanfaatan ketersediaan jaringan internet untuk mempermudah dan mendorong perkembangan aktifitas ekonomi dikarenakan keterbatasan pengetahuan tentang potensi pemanfaatan internet bagi kegiatan perekonomian dan kegiatan lainnya.	Dusun I,II dan III
13	Bidang Pekerjaan Umum	
	1. Perlunya rehabilitasi seluruh TPT jalan Desa	Dusun I,II & III
	2. Saluran drainase jalan desa sering mampet pada musim hujan	Dusun I,II & III
	3. Perlu peningkatan infrastruktur jalan usaha tani sehingga mobilitas masyarakat lebih mudah	Dusun I,II & III
	4. Masih terdapat jalan gang yang belum diaspal/dirabat beton sehingga belum bias dilalui oleh kendaraan	Dusun I
	5. Penanda batas desa belum terpasang semua	Dusun I,II &

		III
	6. Perlu dibangunnya Tanggul Penahan Longsor (TPL) agar tidak mengancam permukiman warga	Dusun III
14	Bidang Perhubungan	
	1. Penerangan lampu jalan desa belum maksimal	Dusun I,II & III
15	Bidang Perumahan	
	1. Pengelolaan sampah keluarga belum maksimal	Dusun I,II & III
	2. Masih banyak kandang ternak warga masih menyatu dengan rumah	Dusun I,II & III
16	Bidang Pertahanan	
	1. Tanah milik masyarakat belum seluruhnya memiliki sertifikat bukti kepemilikan tanah	Dusun I,II & III
	2. Kepemilikan tanah kas desa belum seluruhnya tersertifikasi	Dusun I & II
17	Bidang Ketahanan Pangan	
	1. Perlu ada sampel pengelolaan usaha bidang pertanian untuk memotifasi masyarakat agar bertani dengan baik	Dusun I,II & III
	2. Perlu percontohan pengelolaan lahan pertanian yang baik	Dusun I,II & III
	3. Pada musim kemarau sulit untuk bercocok tanam	Dusun I,II & III
	4. Sedikitnya lahan persawahan yang terdapat di Desa Dukuhdalem	Desa
	5. Perlunya dibentuk kelompok-kelompok masyarakat yang perannya sebagai motor penggerak bagi masyarakat umum dalam upaya peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat	Dusun I,II & III
18	Bidang Pertanian	
	1. Perlunya penyuluhan pertanian	Dusun I,II & III
	2. Hewan ternak yang sakit diobati masih secara tradisional	Dusun I,II & III

		III
	3. Biaya olah lahan mahal	Dusun I,II & III
	4. Harga pupuk kimia mahal	Dusun I,II & III
	5. Musim kemarau sering gagal panen karena kekeringan	Dusun I,II & III
	6. Banyaknya peralihan fungsi lahan bagi cocok tanam palawija menjadi lahan untuk pohon tebang (Kayu)	Dusun I,II & III
19	Bidang Perikanan	
	1. Budidaya ikan air tawar belum maksimal	Dusun I,II & III
20	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	1. Belum maksimalnya BUMDES dikarenakan kurangnya modal untuk pengembangan usaha dan kurangnya SDM pengelola dalam wawasan bisnis/usaha	Dusun I,II & III
	2. Usaha agroindustri pertanian belum berkembang	Dusun I,II & III
	3. Belum ada usaha penyedia kebutuhan petani	Dusun I,II & III
	4. Belum ada wadah untuk menampung hasil pertanian, usaha kecil dan hasil produk rumahan dari masyarakat	Dusun I,II & III
21	Bidang Perindustrian	
	1. Kreatifitas dan jiwa wirausaha masyarakat untuk meningkatkan pendapatan rendah	Dusun I,II & III
	2. Perlu adanya pelatihan pengembangan usaha rumahan (<i>home industry</i>)	Dusun I,II & III
22	Bidang Perdagangan	
	1. Potensi ada tetapi minim sekali sarana dan juga pengetahuan untuk memasarkan produk rumahan dan produk unggulan Desa	Dusun I,II & III
	2. Perlu adanya pelatihan pengembangan varian produk yang dihasilkan oleh masyarakat sehingga hasilnya mempunyai daya jual dan daya saing pasar	Dusun I,II dan III

	3. Belum adanya pusat penampungan hasil produksi masyarakat sebagai wahana pemasaran	Dusun I,II & III
23	Bidang Pariwisata	
	1. Potensi wisata taman kehati belum dikelola secara maksimal dan baik. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan dana pengembangan dan juga harus ada resolusi tentang pengelolaan taman kehati agar mampu memberikan penghasilan bagi desa, mampu memberdayakan bagi masyarakat luas, dan juga mampu mengangkat nama baik desa.	Dusun II
24	Bidang Kebudayaan	
	1. Belum tersedianya sarana pentas Budaya Desa	Dusun I,II & III
	2. Belum terorganisir secara baik kegiatan-kegiatan sosial budaya yang terdapat di tengah masyarakat	Dusun I,II & III
25	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	
	1. Sarana linmas perlu pemeliharaan rutin	Dusun I,II & III
	2. Tunjangan bagi satuan penegak hukum belum memadai	Dusun I,II & III
	3. Belum maksimalnya peran linmas	Dusun I,II & III
	4. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam wawasan kebangsaan dan politik dalam skala desa	Dusun I,II & III
26	Bidang Lingkungan Hidup	
	1. Saluran air sering mampet oleh sampah	Dusun I,II & III
	2. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dengan baik	Dusun I,II & III
	3. Pengelolaan Bank Sampai Unit yang ada belum maksimal dan perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana	Dusun II
27	Bidang Kehutanan	
	1. Areal tanah desa belum dikelola dengan baik	Dusun II

	2. Perlu adanya peningkatan pengetahuan bagi masyarakat dalam pengembangan budidaya tanaman yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga	Dusun I,II & III
28	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
	1. Banyak keluarga yang seharusnya mendapat subsidi listrik	Dusun I,II & III
	2. Kegiatan umum pada waktu malam terkadang terganggu dengan matinya aliran listrik PLN	Dusun I,II & III

4.2. POTENSI

Potensi yang dimiliki oleh Desa Dukuhdalem dalam mencapai visi dan misi yang akan dicapai diantaranya adalah meliputi :

1. Hasil Pembangunan Sebagai Modal Dasar

Hasil-hasil pembangunan baik fisik maupun non-fisik yang telah dicapai oleh pemerintah Desa selama ini dapat dijadikan sebagai modal dasar bagi tahapan pembangunan selanjutnya.

2. Adanya Potensi Sumberdaya Alam dan Potensi Ekonomi lainnya

Potensi sumberdaya alam dan potensi ekonomi yang tersedia di Desa Dukuhdalem terutama di bidang pertanian dalam arti luas, yang dapat dikembangkan untuk pembangunan Desa Dukuhdalem kini dan di masa mendatang.

3. Ketersediaan Tenaga Kerja

Ketersediaan tenaga kerja di Desa Dukuhdalem apabila diiringi dengan peningkatan kualitas SDM, maka akan menjadi salah satu kekuatan pembangunan.

4. Budaya Keterbukaan

Adanya budaya keterbukaan atau keterusterangan masyarakat Desa Dukuhdalem akan menjadi bekal kejujuran serta mau menghargai dan menerima pendapat pihak lain tentu saja yang sifatnya konstruktif.

5. Rasa Persaudaraan dan Kebersamaan

Terpeliharanya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa Dukuhdalem baik yang berada di daerah maupun di luar daerah. Menandakan masyarakat memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Hal ini sangat penting untuk membangun kekuatan rakyat dalam rangka mewujudkan pembangunan.

6. Kehidupan Religijs/Agamis

Kehidupan religijs yang sudah terbangun dalam masyarakat Desa Dukuhdalem dapat menjadi peranan yang sentral dalam pembangunan dan menjadi landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun bermasyarakat.

7. Ketersediaan lahan

Desa Dukuhdalem memiliki sebagian besar untuk perkebunan dan hanya sedikit untuk persawahan potensi kehutanan belum digunakan secara dioptimalkan. Luas lahan ini menjadi suatu peluang untuk dioleh dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga Dukuhdalem.

8. Organisatoris

Masyarakat Desa Dukuhdalem relatif mudah membentuk suatu kelompok atau organisasi baik yang bersifat profit maupun non profit (sosial).

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran dari setiap visi dan misi RPJMDesa Dukuhdalem Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan Tahun 2022 – 2027 yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) selama periode tahun 2022 – 2027.

5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa :-

No	Bidang	Kebijakan	Program
1	2	3	4
1.	Pendidikan	Peningkatan kualitas sarana prasarana dan perluasan akses pendidikan pada semua jenjang, akan dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :	a) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; b) Program pendidikan anak usia dini/informal c) Pendidikan keagamaan/MD/informal
2.	Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, akan dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :	a) Program peningkatan dukungan sarana/prasarana penunjang kualitas kesehatan masyarakat; b) Program penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; c) Program perbaikan Gizi, pelayanan kesehatan penduduk miskin, anak balita, ibu hamil, bayi dan balita.
3.	Bidang Sosial	Peningkatan upaya penanggulangan masalah dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan keagamaan, akan dilaksanakan melalui	a) Program pemberdayaan fakir miskin, dan masalah kesejahteraan sosial lainnya; b) Program pemberdayaan kelembagaan

		:	sosial/keagamaan
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kebijakan peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat perDesaan, akan dilaksanakan melalui :	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perDesaan melalui lembaga ekonomi
5.	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1. Kebijakan peningkatan pembinaan olah raga pendidikan dan prestasi akan dilaksanakan melalui :	a) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga; b) Program pembinaan dan permasyarakatan Olahraga
		2. Peningkatan kemandirian, kreatifitas, dan produktivitas pemuda, akan dilaksanakan melalui :	Program peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan;
6.	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.	1. Kebijakan peningkatan profesionalisme aparatur Pemerintah dan Desa berbasis kinerja, dan dukungan sarana/prasarana penunjang kinerja pemerintahan Desa akan dilaksanakan melalui :	a) Program peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan pemerintahan Desa b) Program peningkatan kualitas dukungan sarana/prasarana penunjang kinerja pemerintahan Desa.
7.	Bidang Pekerjaan Umum	Peningkatan kualitas sarana prasarana pembangunan dan pemeliharaan di Desa akan dilaksanakan melalui :	a) Program pembangunan jalan dan jembatan berikut penunjangnya; b) Program peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan; c) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, program penyediaan

			sarana/prasarana Desa.
8.	Bidang Pertanian	1. Peningkatan produktivitas hasil pangan dan hortikultura, akan dilaksanakan melalui : 2. Kebijakan peningkatan produktivitas hasil ternak, akan dilaksanakan melalui :	a) Program pemberdayaan agro industri pertanian melalui BUMDES dan Program PUAP b) Program dukungan, sarana prasarana pertanian/perkebunan; c) Program penyediaan alat pendukung pengolahan pertanian/perkebunan.
9.	Bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kebijakan peningkatan kewirausahaan serta SDM para pelaku usaha kecil menengah, akan dilaksanakan melalui :	a) Program pengembangan kewirausahaan dengan dukungan permodalan usaha kecil/home industri/kelompok-kelompok usaha; b) Program pengembangan jaringan serta sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil/ home industri / kelompok-kelompok usaha.
10.	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	Peningkatan suasana kondusif menjaga ketentraman dan keterlibatan umum dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, akan dilaksanakan melalui :	a) Program penyediaan sarana / prasarana penunjang ketertiban, keamanan serta kenyamanan lingkungan;

5.1.2. Program Pembangunan Desa :-

Adapun program-program pembangunan dengan berdasar pada bidang-bidang di atas, rencana Desa Dukuhdalem bisa di lihat pada tabel di bawah :

No	Bidang	Kebijakan	Program
1	2	3	4
1.	Pendidikan	1. Program wajib belajar pendidikan	a1. Dana bantuan siswa miskin

		<p>dasar sembilan tahun;</p> <p>2. Program pendidikan anak usia dini/informal.</p>	<p>a2. Dana bantuan beasiswa sekolah</p> <p>a3. Pengadaan perlengkapan sekolah</p> <p>a4. Rehab gedung SD</p> <p>b1. Pembangunan gedung PAUD</p>
2.	Kesehatan	<p>1. Program peningkatan dukungan sarana/prasarana penunjang kualitas kesehatan masyarakat;</p> <p>2. Program penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>3. Program perbaikan Gizi, pelayanan Kesehatan penduduk miskin, anak balita, ibu hamil, bayi dan balita.</p>	<p>a1. Pengadaan perlengkapan gedung Posyandu</p> <p>a2. Pembangunan gedung Posyandu</p> <p>a3. Rehab gedung puskesmas pembantu</p> <p>a4. Pemagaran halaman puskesmas pembantu</p> <p>b1. Penyuluhan kesehatan</p> <p>c1. Pembinaan PMT perangsang kehadiran</p> <p>c2. Pemberian bantuan dana persalinan</p> <p>c3. Memberi Bantuan Makanan Tambahan (PMT)</p>
3.	Bidang Sosial	<p>a) Program pemberdayaan fakir miskin, dan masalah kesejahteraan sosial lainnya;</p> <p>b) Program pemberdayaan kelembagaan sosial/keagamaan</p>	<p>a1. Bantuan orang tua jompo, orang cacat dan terlantar;</p> <p>a2. Pembiayaan stimulan rumah tidak layak huni;</p> <p>b1. Alokasi dana pemeliharaan sarana ibadah</p> <p>b2. Rehab bangunan</p>

			mesjid b3. Rehab bangunan mushola
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perDesaan melalui lembaga ekonomi peDesaan.	Pembiayaan lembaga BUMDES
5.	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	a) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga; b) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.	a1. Perbaikan lapangan Bola Voly/Bulu Tangkis a2. Pemeliharaan kebun pemuda a3. Mendirikan kelompok-kelompok pemuda tani dan remaja mesjid
		a) Program peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan;	Pembangunan Gedung Karang Taruna yang representatif
6.	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.	a) Program peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan pemerintahan Desa; b) Program peningkatan kualitas dukungan sarana/prasarana penunjang kinerja pemerintahan Desa	a1. Belanja rutin kegiatan pemerintahan a2. Alokasi dana penguatan SDM aparatur Desa a3. Alokasi dana insentif untuk kader Desa b1. Alokasi dana pemeliharaan ATK dan mebeuleir Desa b2. Pembangunan Bale Desa
7.	Bidang	a) Program	a1. Pengembangan

	Pekerjaan Umum	<p>pembangunan jalan dan jembatan berikut penunjangnya;</p> <p>b) Program peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan;</p> <p>c) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;</p> <p>d) Program penyediaan sarana/prasarana Desa</p>	<p>drainase jalan</p> <p>a2. Pembangunan TPT jalan lingkungan</p> <p>a3. Pembangunan gorong-gorong</p> <p>a4. Pembangunan jembatan beton</p> <p>b1. Penghotmikkan jalan</p> <p>b3. Perbaikan sayap jembatan</p> <p>c1. Rehab bendung irigasi</p> <p>c2. Pembangunan batas Desa</p>
8.	Bidang Pertanian	<p>a) Program peningkatan kesejahteraan petani / peternak;</p> <p>b) Program dukungan sarana prasarana pertanian / perkebunan;</p> <p>c) Program penyediaan alat pendukung pengolahan pertanian / perkebunan.</p>	<p>a1. Bantuan permodalan untuk usaha tani</p> <p>a. Pembangunan saung pertanian</p> <p>b1. Pembangunan lumbung padi (hasil panen)</p> <p>b2. Pengadaan mesin traktor</p>
9.	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	<p>a) Program pengembangan kewirausahaan dengan dukungan permodalan usaha kecil/home industri/keompok-kelompok usaha;</p> <p>b) Program pengembangan jaringan serta sistem pendukung usaha</p>	<p>a1. Bantuan pengembangan usaha kelompok perempuan</p> <p>a2. Bantuan permodalan untuk usaha agroindustri makanan</p> <p>b1. Bantuan pengembangan untuk UKM dan home industri.</p>

		bagi usaha mikro kecil / home industri / kelompok-kelompok usaha.	
10.	Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	a) Program penyediaan sarana / prasarana penunjang ketertiban, keamanan serta kenyamanan lingkungan; Program pengembangan pengelolaan persampahan Program pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	a1. Rehab poskamling Desa a2. Pembangunan tempat pembuangan sampah b1. Normalisasi sungai

5.1.3. Strategi Pencapaian

Dalam mewujudkan arah kebijakan serta program pembangunan di Desa Dukuhdalem maka strategi pencapaian yang dilakukan fokus pada misi yang telah ditetapkan.

Strategi Pencapaian Misi 1 : “Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Bersih”

Dalam upaya perwujudan pemerintahan desa yang bersih perlu ditempuh langkah-langkah kongkrit, diantaranya yaitu dengan :

1. Mengelola keuangan desa yang efektif dan efisien
Agar pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien desa akan mengedepankan pembelanjaan pada penilaian skala prioritas dan tetap disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penetapan jenis dan program kegiatan tetap berdasar pada hasil musyawarah desa.
2. Meniadakan sikap korupsi dan kolusi di tubuh pemerintah desa
Dalam hal ini pemerintahan desa akan terus memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas perangkat desa agar terus mendorong kedisiplinan dalam bekerja, mengedepankan sikap profesionalisme dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
Selain itu, pemerintahan desa akan terus mengevaluasi penggunaan keuangan desa secara berkala dalam setiap bulannya.

3. Melaksanakan pembangunan secara partisipatif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan
Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa akan melibatkan unsur masyarakat mulai dari perencanaan pembangunan, penetapan anggaran sampai pada penetapan pelaksanaan/realisasi anggaran. Membuat sarana info publik yang bisa diakses oleh setiap warga tentang anggaran dan belanja desa.

Strategi Pencapaian Misi 2 : “Mendorong Desa ke Arah yang Lebih Maju”

Guna mendorong desa lebih maju lagi maka ditempuh strategi berikut :

1. Melanjutkan dan mengembangkan program-program pemerintahan yang terdahulu
2. Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi kinerja perangkat Desa sesuai dengan jabatan dan fungsinya demi efektivitas pelayanan masyarakat Desa
3. Melaksanakan birokrasi pemerintahan desa yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Optimalisasi pengelolaan asset Desa menjadi potensi penghasilan Desa
5. Mendorong lembaga keuangan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wahana sentral perekonomian masyarakat Desa dan sumber penghasilan Desa.
6. Membentuk, membina dan mendorong kemajuan kelompok-kelompok usaha kecil dan tani
7. Mendorong potensi para pemuda karang taruna
8. Maksimalisasi peran para kader pemberdayaan masyarakat baik PKK, Kader posyandu dan Pengurus Kampung KB
9. Mengembangkan sarana dan prasarana lembaga pendidikan Dasar non formal baik umum ataupun keagamaan.

Strategi Pencapaian Misi 3 : “Mendorong Masyarakat Desa yang Lebih Agamis”

1. Mengakomodir dan mendorong kegiatan-kegiatan keagamaan menjadi piranti kemajuan masyarakat dalam bidang keagamaan
2. Mengembangkan lembaga pendidikan dasar keagamaan
3. Meningkatkan kapasitas remaja masjid
4. Meningkatkan kapasitas pelayanan tenaga kifayah
5. Meningkatkan kapasitas para pengurus majelis ta’lim
6. Mendorong partisipasi aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat Desa dalam setiap musyawarah pembangunan Desa
7. Membangun sarana ibadah yang baik bagi masyarakat dan
8. Membangun MDTA sebagai sarana pendidikan Islam bagi anak-anak.

Strategi Pencapaian Misi 4 : “Menciptakan Pemerintahan Desa yang Berkeadilan”

1. Meniadakan sikap nepotisme di dalam lingkungan pemerintahan Desa
2. Persamaan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa
3. Penggunaan anggaran berdasarkan aspek prioritas

Secara sistematis strategi pencapaian yang dilakukan oleh Desa Dukuhdalem dituangkan dalam 6 (enam) dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yaitu :

- a. RKPDes 1 untuk Pelaksanaan Kegiatan tahun pertama (2022)
- b. RKPDes 2 untuk Pelaksanaan tahun kedua (2023)
- c. RKPDes 3 untuk Pelaksanaan tahun ketiga (2024)
- d. RKPDes 4 untuk Pelaksanaan tahun keempat (2025)
- e. RKPDes 5 untuk Pelaksanaan kegiatan tahun kelima (2026)
- f. RKPDes 6 untuk Pelaksanaan kegiatan tahun keenam (2027)

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Agar pengelolaan keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). RAPBDesa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk untuk periode tahun 2022 – 2027 meliputi :

- a. Bidang pemerintahan desa;
- b. Pembangunan masyarakat desa;
- c. Pembinaan masyarakat desa;
- d. Pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Penanggulangan bencana dan
- f. Pembiayaan.

Dari uraian proses Review / Revisi RPJMDesa di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan susunan program jangka menengah untuk program pembangunan dan merupakan rencana induk Desa Dukuhdalem yang menjadi acuan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dalam kegiatan tahunan.
2. Tujuan Review / Revisi RPJMDesa adalah :
3. Dalam rangka menyusun kebutuhan riil masyarakat, kemudian menjadi usulan dalam RPJMDesa ini dilakukan melalui proses pemetaan swadaya, analisa masalah dan potensi serta perumusan kegiatan dan langkah-langkah pengawasan yang dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan harapan agar dapat :
 - a. Melestarikan semangat demokrasi di lingkungan masyarakat dalam merumuskan berbagai kebijakan;
 - b. Membangun semangat kebersamaan dan kerjasama antar warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - c. Menggali dan mengembangkan potensi, bakat, dan keinginan yang ada di Desa Dukuhdalam dalam berbagai bidang.

Mudah – mudahan dengan Revisi RPJMDesa ini dapat memberikan gambaran perencanaan yang lebih komprehensif untuk lima tahun ke depan.

KEPALA DESA DUKUHDALAM





RPJM DESA PERIODE 2022 - 2027

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
PERIODE 2022 - 2027**



CONTACT

PHONE:
082321455536

WEBSITE:
WWW.DUKUHDALEM.ORG

EMAIL:
Dukuhdalem.japara2@gmail.com

DESA : DUKUHDALEM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT
TAHUN : 2022



KABUPATEN KUNINGAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHDALAM
NOMOR : 188/4/PEMDES/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2022 - 2027
DESA DUKUHDALAM KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN**

KEPALA DESA DUKUHDALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Dukuhdalem, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa Dukuhdalem yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2022 – 2027.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017

tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 melalui anggaran dan belanja Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 44 Nomor 2017); dan
30. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 49);
31. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
32. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Kuningan;
33. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
34. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
35. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
36. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kuningan;
37. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 6).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022 - 2027 pada Tanggal 10 Januari Tahun 2022 yang bertempat di Balai Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Desa Dukuhdalem tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Dukuhdalem Tahun 2022 – 2027 (Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022 – 2027 terlampir).
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:
1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa selama 1-3 bulan sejak ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022 – 2027;
 3. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2022 – 2027 pada BPD untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2022 – 2027 dibebankan pada APB Desa dan Swadaya Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di: Desa Dukuhdalem

Tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DESA DUKUHDALEM



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Kepala Dinas PMD Kabupaten Kuningan
Ketua BPD Desa Dukuhdalem
Camat Japara
Tim Penyusun RPJMDesa Dukuhdalem

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Dukuhdalem

Tanggal : 02 Februari 2022

Nomor : 188/04/Pemdes/2022

**TIM PENYUSUN RPJM DESA
DESA DUKUHDALAM KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2022 - 2027**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	JUHARI	Pembina	Kepala Desa
2.	NURDIN, S.Sos.I	Ketua	Sekretaris Desa
3.	CECEP NUROHIM	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4.	MUSA	Anggota	Kasi Pemerintahan
5.	SARJO SARIPUDIN	Anggota	Kasi Kesra
6.	DUDUNG ABDUROHMAN	Anggota	Kasi Pelayanan
7.	M. SALMAN	Anggota	Kadus I
8.	SARMADI	Anggota	Kadus II
9.	ARIS MUNAJAT	Anggota	Kadus III
10.	ELON SAHLAN, S.E.	Anggota	Ketua LPM
11.	DIDI AHDIAT	Anggota	Ketua DKM/MUI

KEPALA DESA DUKUHDALAM



DAFTAR KEGIATAN PEMBAGUNAN YANG MASUK KE DESA

DESA : DUKUHDALAM
 KECAMATAN : JAPARA
 KABUPATEN : KUNINGAN
 PROVINSI : JAWA BARAT

No.	Asal Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana	Prakiraan Pelaksana
1.	Dari Pemerintah Kabupaten	1. Hand Tractor	25.000.000	Dinas Pertanian
		2. Satu Set Alat Olahraga	15.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		3. Pengaspalan Jalan Lingkungan	100.000.000	DPKPP
		4.		
		5.		
2.	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	1. Rehabilitasi Embung Desa	200.000.000	PU
		2. TPS 3 R	400.000.000	DLH Provinsi
		3.		
		4.		
		5.		
3.	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten / Kota	1. Pengaspalan Jalan Desa	200.000.000	PU
		2. Semen	3.000.000	PUTR
		3.		
		4.		
		5.		

Mengetahui,
 Kepala Desa

 (JUHDARI)

Dukuhdalem, 28 Februari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

 (NURDIN)

**LAPORAN HASIL INVENTARIS ASET DESA DUKUHALEM KECAMATAN JAPARA
BERUPA PERALATAN DAN MESIN**

DESA : DUKUHALEM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : DUKUHALEM
PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk /Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi barang			Keterangan
							B	RR	RS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1 Set Komputer	3070102	20	NOC	2014	3,500,000	1			Kantor
2	Kursi Sudut	3050201	21	Tidak ada	2014	2,500,000	1			Kantor
3	Lemari arsip	3050104	22	Tidak ada	2014	3,000,000	3			Kantor
4	Meja Rapat	3050201	23	Tidak ada	2014	300,000	3			Kantor
5	Kursi Plastik	3050201	24	Tidak ada	2015	1,200,000	30			Kantor
6	Meja Tulis	3050101	25	Tidak ada	2015	1,200,000	3			Kantor
7	Kaki Tiga Timbanagn	3030303	26	Tidak ada	2015	500,000	3			Posyandu
8	Gordeng	3050206	27	Tidak ada	2015	1,000,000	4			Kantor
9	Timbanagn Gantung	3030305		Tidak ada	2015	500,000	3			Posyandu
10	Portable	3060101	27	Tidak ada	2015	2,000,000	1			Kantor
11	TV 12 INCI	3060341	27	Tidak ada	2015	1,200,000			1	Kantor
12	Parabola	3060341	28	Matrix	2016	1,919,000			1	Kantor
13	Meja Tulis	3050201	29	Saga	2016	3,450,000	6	6		Kantor
14	Kursi Kerja	3050201	30	TT Polos	2016	1,470,000	5	1		Kantor
15	Kursi Plastik	3050201	31	Tidak ada	2016	30,000	40			Kantor
16	Lemari Buku	3050104	34	Olimpic	2016	750,000	1			PKK
17	Leptop	3070102	35	Acer	2016	8,650,000	2			Kantor
18	Printer	3070102	36	Epson	2016	1,950,000	1			Kantor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Proyektor	3050105	40	Tidak ada	2016	5,100,000	1			Kantor
21	Rak Buku	3050304	41	Tidak ada	2016	300,000	1			Posyandu
22	Ranjang Pasien	3050308	42	Tidak ada	2016	500,000	1			Posyandu
23	Gordeng	3050206	43	Tidak ada	2016	500,000	1			Posyandu
24	Net Poly	3100102	44	Tidak ada	2016	200,000	1			Karangtaruna
25	Kamera Digital	3060102	45	Canon	2016	1,950,000	1			Kantor
26	Kursi Rapat	3050201	47	Tidak ada	2017	3,000,000	30			Kantor
27	Taplak Meja Rapat	3050105	49	Tidak ada	2017	750,000	15			Kantor
28	Jam Dinding	3050202	50	Nagoya	2017	600,000	4			Kantor
29	Kompas Gas	3070203	51	Rinal	2017	500,000	1			Kantor
30	White Bord	3050206	54	Tidak ada	2017	150,000	1			Kantor
31	Mesin Rumput	3050203	55	Tacho	2017	2,000,000	1			Kantor
32	Laptop	3070102	56	HP	2018	10,500,000	3			Kasi pel, Kaur Keuangan, Kadus 3
33	Mesin Printer	3070203	57	Epson	2018	3,000,000	2			Kantor
34	Micropon	3070204	58		2018	300,000	1			Kantor
35	Modem	3070205	59	Tidak ada	2018	400,000	1			Kantor
36	Plasdisk	3070207	60	Tidak ada	2018	100,000	1			Kantor
37	Kursi Tamu	3050201	65	Tidak ada	2018	2,000,000	1			PKK
38	Leptop	3070201	79	Asus	2018	4,000,000	1			Sekdes
39	Mesin Rumput	3050203	80	Tidak ada	2018	2,500,000	1			Kantor
40	Lemari Arsip	3050104	81	Olimpic	2018	2,000,000	2			PKK
41	Kursi Tamu	3050201	82	Sopa	2018	3,500,000	1			PKK
42	Rak Piring	3050205	83	Kramik	2018	1,000,000	1			PKK
43	Ayunan, Perosotan	3100102	86	Tidak ada	2019	3,500,000	2			PAUD
44	Meja Ngaji (Rekal)	3050201	87	Tidak ada	2019	2,000,000	20			DKM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Bola poly	3100102	90	Tidak ada	2019	824,000	2			Karangtaruna
47	Perosotan	3100102	91	Tidak ada	2019	2,500,000	1			PAUD
48	Lemari Buku	3050104	92	Tidak ada	2019	2,400,000	3			Posyandu
49	smartphone	3060201	88	Advan	2019	4,000,000	3			Kadus 1,2,3 dan Admin
50	Laptop	3070102	90	Asus	2020	8,000,000	2			Kaur Perencanaan,Kasi Pem
51	Lemari Buku	3050105	92	Olimpic	2020	3,000,000	3			PAUD
52	Termo Scanner	3070102	95	Tidak ada	2020	3,000,000	3			Kantor
53	Tengkl Semprot	3070102	96	Tidak ada	2020	6,000,000	5			Kantor
54	Galon Air	3070102	97	Tidak ada	2020	300,000	5			Kantor
55	Papan Tulis	3050105	98	Tidak ada	2021	200,000	1			PAUD
56	Perosotan	3100102	99	Tidak ada	2021	2,500,000	1			PAUD
57	Laptop	3070201	100	HP	2021	4,000,000	1			PAUD
58	Printer	3070203	101	Epson	2021	850,000	1			PAUD
59	Plasdisk	3070203	102	Tidak ada	2021	100,000	1			PAUD
60	Rak Buku	3050104	102	Tidak ada	2021	100,000	2			PAUD
61	Karpet	3050102	103	Tidak ada	2021	350,000	7			PAUD
62	Keranjang mainan	3050103	104	Tidak ada	2021	150,000	3			PAUD
63	Tong Sampah	3050103	104	Tidak ada	2021	75,000	3			PAUD
64	Papan Stuktur Organisasi	3050105	105	Tidak ada	2021	100,000	1			PAUD
65	Plasdisk	3070203	102	Tidak ada	2021	100,000	1			PAUD
66	Kotak P3K	3050103	103	Tidak ada	2021	200,000	1			PAUD
67	Thermo Skener	3050102	104	Tidak ada	2021	1,500,000	3			Kantor
68	Mesin Spayer	3050102	105	Tidak ada	2021	2,000,000	3			Kantor
69	Alat Semprotan	3050102	106	Tidak ada	2021	300,000	3			Kantor
70	Timbangan Bayi	3030305	106	Tidak ada	2021	3,000,000	3			Posyandu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Net Poly	3100102	108	Mikasa	2021	300,000	1			Karangtaruna
73	Billboard	3060299	109	Tidak ada	2021	17,000,000	1			Halaman Balai Desa
74	Lapang Tennis Meja	3100102	110	Tidak ada	2021	3,500,000				Kantor

1. JUHARI

Kepala Desa

2. NURDIN.S.Sos.I

Sekretaris desa

3. SUHARTI

kaur umum

4. CECEP NUROHIM

Kaur perencanaan

5. MUSA

Kasi pemerintahan

6. DUDUNG.A

Kasi pelayanan

7. SARJO.S

Kasi kesejahteraan

Tim inventarisasi

(Pemegang kekeuasaan aset Desa)

(Pembantu pengelola aset Desa)

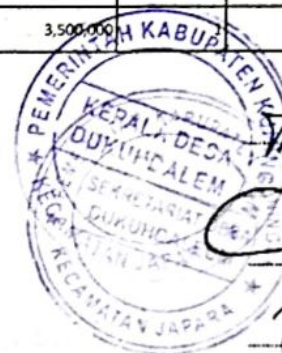
(Petugas/pengelola aset desa)

(Anggota)

(Anggota)

(Anggota)

(Anggota)



[Handwritten signatures and dates]

**LAPORAN HASIL INVENTARISASI (LHI) ASET DESA DUKUHALEM KECAMATAN JAPARA
BERUPA TANAH**

DESA : DUKUHALEM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : DUKUHALEM
PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Jenis Tanah	Kode Barang	NUP	Luas(M2)	Taun pembuatan	atas /hak kepemilikan tanah	Nilai perolehan (Rp)NUOP	Status Tanah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sawah	2010101	1	16,800	1982	SPPT	336,000,000	Bengkok	Bengkok kades terletak di Desa Sindangbarang
2	Sawah	2010101	2	840	1982	SPPT	168,000,000	Bengkok	bengkok Sekdes terletak di Desa Sindangbarang
3	Sawah	2010101	3	6,300	1982	SPPT	126,000,000	Bengkok	Bengkok Kasi Pemerintahan di desaSindangbarang
4	Sawah	2010101	4	6,300	1982	SPPT	126,000,000	Bengkok	Bengkok Kaur Keuangandi Desa Sindangbarang
5	Sawah	2010101	5	6,300	1982	SPPT	126,000,000	Bengkok	Bengkok Kasi Pelayanan di Desa Sindangbarang
6	Sawah	2010101	6	6,300	1982	SPPT	126,000,000	Bengkok	Bengkok Kasi Ekbang di Desa Sindangbarang
7	Sawah	2010101	7	6,300	1982	SPPT	126,000,000	Bengkok	BengkokKaur Umum di Desa Sindangbarang
8	Sawah	2010101	8	6,300	1982	SPPT	126,000,000	Bengkok	Bengkok Kaur Perencanaan di Desa Sindangbarang
9	Sawah	2010101	9	6,300	1982	SPPT	126,000,000	Bengkok	Bengkok Kadus 1 di Desa Sindangbarang
10	Sawah	2010101	10	6,300	1982	SPPT	126,000,000	Bengkok	Bengkok Kadus 2 di Desa Sindangbarang
11	Sawah	2010101	11	6,300	1982	SPPT	126,000,000	Bengkok	BengkokKaDUS 3 di Desa Sindangbarang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Tanah darat taman khati	2010202	14	43,000	1982	SPPT	131,950,000	Tanah Desa	terletak di Kebon Balong Desa Dukuhdalem
15	Kebun	2010301	15	1,400	1982	SPPT	35,000,000	Pemakaman umum	terletak di Dusun 1 Ds Dukuhdalem
16	Tegalan/Pemakaman	2010302	16	6,125	1982	SPPT	91,875,000	Pemakaman umum	terletak di Dusun 2 Ds Dukuhdalem
17	Tegalan/Pemakaman	2010303	17	16,365	1982	SPPT	245,475,000	Pemakaman umum	terletak di Dusun 3 Ds Dukuhdalem
Jumlah							2,016,300,008		

1. JUHARI

Kepala Desa

2. NURDIN S.Sos.I

Sekretaris Desa

3. SUHARTI

Kaur Umum

4. DIDI MULYADI

Kaur Keuangan

(Pemegang kekuasaan Aset
Desa

Pembantu Pengelola Aset Desa

Petugas/Pengurus Aset Desa

(Anggota)

Tim Inventarisasi

5. CECEP NUROHIM

Kaur perencanaan

6. MUSA

Kasi Pemerintahan

7. DUDUNG ABDURROHMAN

Kasi Pelayanan

(Anggota)

(Anggota)

(Anggota)

[Handwritten signatures of team members]

**LAPORAN HASIL INVENTARISASI (LHI) ASET DESA DUKUHALEM KECAMATAN JAPARA
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR**

DESA : DUKUHALEM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : DUKUHALEM
PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/Type	Tahun	Nomor Identitas	Nilai Perolehan	Kondisi Barang			Keterangan
								B	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kendaraan Dinas Roda dua (HONDA CS 1)	3020101	25	Honda /CS12 A1RR M/T		No Polisi : E8020 Y	15,000,000	1			Bantuan Pemerintah
						No Mesin : JBA1F1134730					Propinsi, sebagai motor
						No Rangka : MHMU5TU2E8K020262					Dinas Kepala Desa
						No BPKB :					
2	Kendaraan Roda Empat (Mobil Penangkut Sampah)	3020102	30	COLT T 120 SS	2020	No Polisi : E8020 Y	56,000,000	1			Beli Sendiri Sumber Dana
						No Mesin : 4G15DO2604					Desa (DD)
						No Rangka : MHMU5TU2E8K020262					
						No BPKB : R.01044619					

1. JUHARI

kepala Desa

2. NURDIN, S.Sos.I

Sekretaris Desa

3. SUHARTI

Kaur Umum

4. DIDI MULYADI

Kaur Keuangan

(Pemegang kekuasaan Aset Desa)

Pembantu Pengelola Aset Desa

Petugas/Pengurus Aset Desa

(Anggota)

Tim Inventarisasi

5. CECEP NUROHIM

Kaur perencanaan

6. MUSA

Kasi Pemerintahan

7. DUDUNG ABDUROHMAN

Kasi Pelayanan

(Anggota)

(Anggota)

(Anggota)

**LAPORAN HASIL INVENTARISASI (LHI) ASET DESA DUKUHALEM KECAMATAN JAPARA
BERUPA BANGUNAN**

DESA : DUKUHALEM
 KECAMATAN : JAPARA
 KABUPATEN : DUKUHALEM
 PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Jenis Bangunan	Kode Barang	NUP	Luas(M2)	Tahun Perolehan	Tipe Bangunan	Nilai (RP)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembangunan Gedung Posyandu Dusun 3	4010102	1	54	2016	Permanen	45,450,000	Sumber Dana Dari Inprastuktur Perdesaan (IP)
2	Pembangunan Garasi Halaman Bale Desa	4010107	2	12	2016	Permanen	7,000,000	sumber Dana Dari Dana Desa (DD)
3	Pembangunan Gedung Posyandu Dusun 2	4010109	3	80	2017	Permanen	77,032,000	sumber Dana Dari Dana Desa (DD)
4	Pembangunan Tempat Ibadah (Mesjid)	4010101	4	17 x 17	2017	Permanen	111,000,000	Sumber Dana Dari Dana Desa (DD)
5	Pembangunan Gedung Serbaguna	4010110	5	126	2018	Permanen	100,000,000	Sumber Dana Dari Infrastuktur Perdesaan (IP)
6	Pembangunan MCK Taman Kehati	4010103	6	6 Unit	2018	Permanen	31,691,000	sumber Dana Dari Dana Desa (DD)
7	Pembangunan Tempat Ibadah (Mesjid)	4010110	7	420	2018	Permanen	100,000,000	sumber Dana Dari Dana Desa (DD)
8	Pemabangunan Bale Desa	4010102	8	143	2019	Permanen	106,188,000	Sumber Dana Dari Infrastuktur Perdesaan (IP)
9	Pemabangunan Gapura Batas Desa Dusun 1	4010199	9	20	2019	Permanen	30,134,500	sumber Dana Dari Dana Desa (DD)
10	Pembangunan Gapua Batas DesaDusun 3	4010120	10	16	2019	Permanen	30,134,500	sumber Dana Dari Dana Desa (DD)
11	Pembangunan RUTILAHU	4010105	11	4 Unit	2019	Permanen	12,000,000	Sumber Dana dari Propinsi
12	Pembangunan MCK Taman Kehati	4010103	11	10 Unit	2019	Permanen	56,567,000	sumber Dana Dari Dana Desa (DD)
13	Pembangunan Gedung Serbaguna	4010107	12	17 x 10,5	2020	Permanen	100,000,000	Sumber Dana Dari Infrastuktur Perdesaan (IP)
14	Pembangunan Pasilitas Pengelolaan Sampah	4010117	13	108	2020	Semipermanen	9,580,000	Sumber Dana dari DAna Desa (DD)
15	Pembangunan Gedung Serbaguna	4010117	14	17 x 10,5	2021	Permanen	76,350,000	Sumber Dana Dari Infrastuktur Perdesaan (IP)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Pembangunan Posko Covid Dusun 1	4010117	16	4,5	2021	Semipermanen	5,156,500	sumber Dana Dari Dana Desa (DD)
Jumlah							898,283,508	

1. JUHARI

Kepala Desa

2. NURDIN.S.Sos.I

Sekretaris Desa

3. SUHARTI

Kaur Umum

4. DIDI MULYADI

Kaur Keuangan

(Pemegang kekuasaan Aset
Desa

Pembantu Pengelola Aset
Desa

Petugas/Pengurus Aset
Desa

(Anggota)

Tim Inventarisasi

5. CECEP NUROHIM

(Anggota)

Kaur perencanaan

6. MUSA


(Anggota)

Kasi Pemerintahan

7. DUDUNG.ABDUROHMAN

(Anggota)

Kasi Pelayanan







**LAPORAN HASIL INVENTARISASI (LHI) ASET DESA DUKUHALEM KECAMATAN JAPARA
BERUPA JALAN**

DESA : DUKUHALEM
 KECAMATAN : JAPARA
 KABUPATEN : DUKUHALEM
 PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Jenis Jalan	Kode Barang	NUP	Ukuran	Tahun Perolehan	Tipe	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jalan Desa Dusun 1	5010101	40	1950	2016	Jalan Desa	243,922,032
2	Jalan Desa Dusun 2	5010101	41	1950	2016	Jalan Desa	243,922,032
3	Jalan Desa Dusun 2	5010101	42	250	2016	Jalan Desa	50,000,000
4	Jalan Lingkungan Dusun 1	5010101	43	120	2016	Jalan Lingkungan	8,113,000
4	Gorong - gorong Halaman Bale Desa	5010102	44	11,2	2016	Gorong - Gorong	3,777,100
5	Jalan Desa Dusun 1	5010101	45	4,860	2017	Jalan desa	115,866,000
7	Gorong - gorong Halaman Bale Desa	5010101	46	3	2017	Gorong - Gorong	7,047,000
8	Jalan Lingkungan Dusun 2	5010101	47	18	2018	Jalan Lingkungan	4,000,000
9	Jalan Lingkungan Dusun 1	5010101	48	1483	2018	Jalan Lingkungan	185,915,000
10	Jalan Lingkungan Dusun 2	5010101	49	564	2018	Jalan Lingkungan	110,030,000
11	Jalan Gang Dusun 3	5020404	50	419	2018	Jalan Gang	48,074,000
12	Jalan Desa Dusun 3	5010101	51	1550	2018	Jalan Desa	76,000,000
13	Gorong gorong	5020404	52	2	2018	Jalan Desa	4,000,000
14	Jalan Desa Dusun 1	5010101	53	1,000	2019	Jalan Desa	92,135,000
15	Jalan Desa Dusun 1	5010101	54	1,050	2019	Jalan Desa	39,050,000
16	Jalan Desa dusun 2	5010101	55	2,800	2019	Jalan Lingkungan	94,462,500

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Jembatan	5010101	57	5	2019	Jembatan	27,180,000
26	Jalan Usaha Tani	5010101	65	720	2021	Jalan Usaha Tani	110,000,000
Jumlah							1,367,358,672

1. JUHARI

Kepala Desa

2. NURDIN.S.Sos.I

Sekretaris Desa

3. SUNARTI

Kaur Umum

4. DIDI MULYADI

Kaur Keuangan

(Pemegang kekuasaan Aset Desa

Pembantu Pengelola Aset Desa

Petugas/Pengurus Aset Desa

(Anggota)

Inventarisasi

5. CECEP NUROHIM

(Anggota)

Kaur perencanaan

6. MUSA

(Anggota)

Kasi Pemerintahan

7. DUDUNG.ABDUROHMAN

(Anggota)

Kasi Pelayanan

LAPORAN
PENGKAJIAAN KEADAAN DESA
TAHUN 2016 s/d. 2021

DESA : DUKUHDALAM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT

I. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pemetaan Masalah Desa
- e. Pijakan Pengambilan Kebijakan Pembangunan

III. TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dibantu oleh beberapa perwakilan dari unsur lembaga atau elemen masyarakat. Adapun tim tersebut adalah :

TIM PENYUSUN RPJM DESA
DESA DUKUHDALAM KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2022 – 2027

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	JUHARI	Pembina	Kepala Desa
2.	NURDIN, S.Sos.I	Ketua	Sekretaris Desa
3.	CECEP NUROHIM	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4.	MUSA	Anggota	Kasi Pemerintahan
5.	SARJO SARIPUDIN	Anggota	Kasi Kesra
6.	DUDUNG ABDUROHMAN	Anggota	Kasi Pelayanan
7.	M. SALMAN	Anggota	Kadus I
8.	SARMADI	Anggota	Kadus II
9.	ARIS MUNAJAT	Anggota	Kadus III
10.	ELON SAHLAN, S.E.	Anggota	Ketua LPM
11.	DIDI AHDIAT	Anggota	Ketua DKM/MUI

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode :

1. Penghimpunan data melalui jaring aspirasi dalam musyawarah dusun dan musyawarah desa
2. Pembahasan dan analisa masalah dan potensi desa
3. Penyelarasan visi dan misi serta program pembangunan kabupaten
4. Penetapan arah dan prioritas program pembangunan
5. Penetapan program pembangunan ke dalam peraturan desa

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan untuk memetakan keadaan desa di antaranya adalah :

1. Peta Sosial Desa;
2. Kalender musim;
3. Bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan;
4. Data aset Desa;
5. BUMDESA;
6. Profil Desa dan hasil pendataan SDGS dan
7. Peraturan desa

VI. PROSES PELAKSANAAN

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Membahas dan menetapkan arah kebijakan dan program pembangunan desa melalui musyawarah desa
- e. Menyusun atau merancang program pembangunan desa menjadi peraturan jangka menengah desa

VII. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, bahwa di Desa Dukuhdalem di samping terdapat potensi juga masih banyak permasalahan. Adapun potensi dan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Potensi
 1. Hasil Pembangunan Sebagai Modal Dasar
Hasil-hasil pembangunan baik fisik maupun non-fisik yang telah dicapai oleh pemerintah Desa selama ini dapat dijadikan sebagai modal dasar bagi tahapan pembangunan selanjutnya.
 2. Adanya Potensi Sumberdaya Alam dan Potensi Ekonomi lainnya
Potensi sumberdaya alam dan potensi ekonomi yang tersedia di Desa Dukuhdalem terutama di bidang pertanian dalam arti luas, yang dapat dikembangkan untuk pembangunan Desa Dukuhdalem kini dan di masa mendatang.
 3. Ketersediaan Tenaga Kerja
Ketersediaan tenaga kerja di Desa Dukuhdalem apabila diiringi dengan peningkatan kualitas SDM, maka akan menjadi salah satu kekuatan pembangunan.
 4. Budaya Keterbukaan
Adanya budaya keterbukaan atau keterusterangan masyarakat Desa Dukuhdalem akan menjadi bekal kejujuran serta mau menghargai dan menerima pendapat pihak lain tentu saja yang sifatnya konstruktif.
 5. Rasa Persaudaraan dan Kebersamaan

Terpeliharanya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa Dukuhdalem baik yang berada di daerah maupun di luar daerah. Menandakan masyarakat memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Hal ini sangat penting untuk membangun kekuatan rakyat dalam rangka mewujudkan pembangunan.

6. Kehidupan Relijius/Agamis

Kehidupan religius yang sudah terbangun dalam masyarakat Desa Dukuhdalem dapat menjadi peranan yang sentral dalam pembangunan dan menjadi landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun bermasyarakat.

7. Ketersediaan lahan

Desa Dukuhdalem memiliki sebagian besar untuk perkebunan dan hanya sedikit untuk persawahan potensi kehutanan belum digunakan secara dioptimalkan. Luas lahan ini menjadi suatu peluang untuk dioleh dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga Dukuhdalem.

8. Organisatoris

Masyarakat Desa Dukuhdalem relatif mudah membentuk suatu kelompok atau organisasi baik yang bersifat profit maupun non profit (sosial).

b. Masalah

No	Masalah	Lokasi
1	Pendidikan	
	1. Perlunya penambahan ruang belajar TK	Dusun I
	2. MDTA belum mempunyai gedung/ruang belajar	Dusun I
	3. Kegiatan pembelajaran belum didukung dengan alat praktek	Dusun I
	4. Belum memiliki lapangan bola voli yang permanen dan status masih kontrak tanah masyarakat/pribadi serta belum sesuai standar kelayakan	Dusun I
	5. Siswa yang berprestasi masih banyak dari golongan keluarga yang lemah secara ekonomi sehingga kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi hingga Universitas relatif sulit	Desa
	6. PAUD/TK/MDTA/SD belum ditunjang oleh ketersediaan sarana dan sarana perpustakaan yang lengkap	Desa
	7. Kesejahteraan guru honor masih rendah	Dusun I
	8. fasilitas penelitian/laboratorium sebagai sarana penunjang pendidikan belum ada	Dusun I
	9. Akses informasi masih manual	Dusun I

	10. SDN belum memiliki sarana peribadahan	Dusun I
	11. fasilitas air bersih MCK SD belum baik	Dusun I
	12. Penjaga sekolah belum memiliki ruangan kerja khusus	Dusun I
2	Bidang Kesehatan	
	1. Tidak semua masyarakat miskin terkaper oleh jaminan sosial/BPJS gratis sehingga menyebabkan ketidakmampuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit secara gratis	Dusun I,II & III
	2. Bayi dan balita serta ibu hamil belum mendapatkan bantuan makanan tambahan yang bergizi secara maksimal sehingga menjadi salah satu factor kurang maksimalnya dalam penanggulangan stunting.	Dusun I,II & III
	3. Pada musim penghujan penyebaran nyamuk meningkat terutama nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah. Persoalan ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang terkena penyakit demam berdarah.	Dusun I,II & III
	4. Minimnya alokasi dana bagi kegiatan kader kesehatan	Dusun I,II & III
	5. Peralatan kesehatan masih kurang lengkap	Dusun I,II & III
	6. Perlu adanya kesadaran hidup sehat pada masyarakat	Dusun I,II & III
	7. Penomena pandemic covid-19 hingga saat ini masih meraja lela.	Dusun I,II & III
	8. Lemahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan minimnya kewaspadaan terhadap penyebaran virus covid-19	Dusun I,II & III
3	Bidang Perpustakaan	
	1. Ketersediaan literature buku bacaan di perpustakaan masih minim	Dusun I,II & III
	2. Minat baca siswa SD masih rendah	Dusun I,II & III
	3. Minat baca dan pengetahuan masyarakat Desa masih rendah	Dusun I,II & III
	4. Perlu adanya sarana dan prasarana perpustakaan bagi remaja masjid dan majelis-majelis ta'lim	Dusun I

4	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
	1. Masih ada usia Tua yang hamil	Dusun I,II & III
	2. Masyarakat terutama pasangan usia subur banyak yang tidak mau ber KB secara rutin	Dusun I,II & III
	3. Belum maksimalnya peran pengurus Kampung KB	Dusun I,II & III
5	Bidang Ketenagakerjaan	
	1. Tidak adanya pusat informasi lapangan pekerjaan	Dusun I,II & III
	2. Pemerintahan desa belum maksimal mengeksplorasi potensi desa dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa	Dusun I,II & III
	3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) belum maksimal dan masih terkesan stagnan untuk menjadi pusat kegiatan perekonomian masyarakat desa dan upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan	Dusun I,II & III
6	Bidang Sosial	
	1. Banyak rumah tangga miskin	Dusun I,II & III
	2. Banyak anggota keluarga yang sulit mencari pekerjaan	Dusun I,II & III
	3. Sarana Ibadah belum terawat dengan baik (Dana pemeliharaan tidak memadai)	Dusun I,II & III
	4. Kegiatan-kegiatan sosial keagamaan belum terorganisir dengan baik	Dusun I,II & III
	5. Seiring perubahan kondisi pemerintahan sekarang, rasa gotong royong masyarakat desa semakin memudar	Dusun I,II & III
7	Bidang Ketransmigrasian	
8	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	1. SDM masyarakat desa masih rendah	Dusun I,II & III
	2. Belum maksimalnya pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat	Dusun I,II & III
9	Bidang Kepemudaan Masyarakat Desa	
	1. Belum memiliki fasilitas lapangan bola voli yang permanen dan masih kontrak	Dusun I,II & III

	2. Kegiatan olahraga belum terprogram dengan baik	Dusun I,II & III
	3. Belum ada upaya pengembangan potensi SDA dan SDM untuk menunjang kegiatan pemuda	Dusun I,II & III
	4. Pembinaan kerohanian generasi muda masih lemah dan tidak terkoordinir	Dusun I,II & III
	5. Asset lahan kebun pemuda terlantar	Dusun II
10	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1. Belum ada kegiatan ekonomi yang dimotori perempuan	Dusun I,II & III
	2. Belum maksimalnya peran PKK dan Kader posyandu	Dusun I,II & III
11	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
	1. Sarana pemerintahan desa belum memadai sehingga berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pemerintahan desa	Dusun I
12	Bidang Komunikasi dan Informatika	
	1. Sistem administrasi pemerintahan desa belum keseluruhannya dilaksanakan secara online termasuk di dalamnya pelayanan bagi masyarakat	Dusun I
	2. Belum maksimalnya kelompok masyarakat dan masyarakat desa secara umum dalam pemanfaatan ketersediaan jaringan internet untuk mempermudah dan mendorong perkembangan aktifitas ekonomi dikarenakan keterbatasan pengetahuan tentang potensi pemanfaatan internet bagi kegiatan perekonomian dan kegiatan lainnya.	Dusun I,II dan III
13	Bidang Pekerjaan Umum	
	1. Perlunya rehabilitasi seluruh TPT jalan Desa	Dusun I,II & III
	2. Saluran drainase jalan desa sering mampet pada musim hujan	Dusun I,II & III
	3. Perlu peningkatan infrastruktur jalan usaha tani sehingga mobilitas masyarakat lebih mudah	Dusun I,II & III
	4. Masih terdapat jalan gang yang belum diaspal/dirabat	Dusun I

	beton sehingga belum bias dilalui oleh kendaraan	
	5. Penanda batas desa belum terpasang semua	Dusun I,II & III
	6. Perlu dibangunnya Tanggul Penahan Longsor (TPL) agar tidak mengancam permukiman warga	Dusun III
14	Bidang Perhubungan	
	1. Penerangan lampu jalan desa belum maksimal	Dusun I,II & III
15	Bidang Perumahan	
	1. Pengelolaan sampah keluarga belum maksimal	Dusun I,II & III
	2. Masih banyak kandang ternak warga masih menyatu dengan rumah	Dusun I,II & III
	3. Beberapa rumah terancam bahaya longsor	Dusun III
16	Bidang Pertahanan	
	1. Tanah milik masyarakat belum seluruhnya memiliki sertifikat bukti kepemilikan tanah	Dusun I,II & III
	2. Kepemilikan tanah kas desa belum seluruhnya tersertifikasi	Dusun I & II
17	Bidang Ketahanan Pangan	
	1. Perlu ada sampel pengelolaan usaha bidang pertanian untuk memotifasi masyarakat agar bertani dengan baik	Dusun I,II & III
	2. Perlu percontohan pengelolaan lahan pertanian yang baik	Dusun I,II & III
	3. Pada musim kemarau sulit untuk bercocok tanam	Dusun I,II & III
	4. Sedikitnya lahan persawahan yang terdapat di Desa Dukuhdalem	Desa
	5. Perlunya dibentuk kelompok-kelompok masyarakat yang perannya sebagai motor penggerak bagi masyarakat umum dalam upaya peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat	Dusun I,II & III
18	Bidang Pertanian	
	1. Perlunya penyuluhan pertanian	Dusun I,II & III
	2. Hewan ternak yang sakit diobati masih secara tradisional	Dusun I,II & III

	3. Biaya olah lahan mahal	Dusun I,II & III
	4. Harga pupuk kimia mahal	Dusun I,II & III
	5. Musim kemarau sering gagal panen karena kekeringan	Dusun I,II & III
	6. Banyaknya peralihan fungsi lahan bagi cocok tanam palawija menjadi lahan untuk pohon tebang (Kayu)	Dusun I,II & III
19	Bidang Perikanan	
	1. Budidaya ikan air tawar belum maksimal	Dusun I,II & III
20	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	1. Belum maksimalnya BUMDES dikarenakan kurangan modal untuk pengembangan usaha dan kurangnya SDM pengelola dalam wawasan bisnis/usaha	Dusun I,II & III
	2. Usaha agroindustri pertanian belum berkembang	Dusun I,II & III
	3. Belum ada usaha penyedia kebutuhan petani	Dusun I,II & III
	4. Belum ada wadah untuk menampung hasil pertanian, usaha kecil dan hasil produk rumahan dari masyarakat	Dusun I,II & III
21	Bidang Perindustrian	
	1. Kreatifitas dan jiwa wirausaha masyarakat untuk meningkatkan pendapatan rendah	Dusun I,II & III
	2. Perlu adanya pelatihan pengembangan usaha rumahan (<i>home industry</i>)	Dusun I,II & III
22	Bidang Perdagangan	
	1. Potensi ada tetapi minim sekali sarana dan juga pengetahuan untuk memasarkan produk rumahan dan produk unggulan Desa	Dusun I,II & III
	2. Perlu adanya pelatihan pengembangan varian produk yang dihasilkan oleh masyarakat sehingga hasilnya mempunyai daya jual dan daya saing pasar	Dusun I,II dan III
	3. Belum adanya pusat penampungan hasil produksi masyarakat sebagai wahana pemasaran	Dusun I,II & III
23	Bidang Pariwisata	
	1. Potensi wisata taman kehati belum dikelola secara	Dusun II

	maksimal dan baik. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan dana pengembangan dan juga harus ada resolusi tentang pengelolaan taman kehati agar mampu memberikan penghasilan bagi desa, mampu memberdayakan bagi masyarakat luas, dan juga mampu mengangkat nama baik desa.	
24	Bidang Kebudayaan	
	1. Belum tersedianya sarana pentas Budaya Desa	Dusun I,II & III
	2. Belum terorganisir secara baik kegiatan-kegiatan sosial budaya yang terdapat di tengah masyarakat	Dusun I,II & III
25	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	
	1. Sarana linmas perlu pemeliharaan rutin	Dusun I,II & III
	2. Tunjangan bagi satuan penegak hukum belum memadai	Dusun I,II & III
	3. Belum maksimalnya peran linmas	Dusun I,II & III
	4. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam wawasan kebangsaan dan politik dalam skala desa	Dusun I,II & III
26	Bidang Lingkungan Hidup	
	1. Saluran air sering mampet oleh sampah	Dusun I,II & III
	2. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dengan baik	Dusun I,II & III
	3. Pengelolaan Bank Sampah Unit yang ada belum maksimal dan perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana	Dusun II
27	Bidang Kehutanan	
	1. Areal tanah desa belum dikelola dengan baik	Dusun II
	2. Perlu adanya peningkatan pengetahuan bagi masyarakat dalam pengembangan budidaya tanaman yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga	Dusun I,II & III
28	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
	1. Banyak keluarga yang seharusnya mendapat subsidi listrik	Dusun I,II & III
	2. Kegiatan umum pada waktu malam terkadang terganggu dengan matinya aliran listrik PLN	Dusun I,II & III

VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Desa Dukuhdalem menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa dan membuat Peraturan Desa tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan berpijak pada permasalahan dan potensi tersebut di atas.

Dukuhdalem, 28 Februari 2022

Mengetahui,

Kepala Desa


(JUHARI)



Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(NURDIN)



GAMBAR KALENDER MUSIM


Masalah/ Keadaan/Kegiatan	HUJAN					PANCAROBA			KEMARAU			
	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
Masa Tanam	**	***	****	*								
Masa Panen					**	***	****	*				
Banjir			**	***	****							
Kesehatan:												
Penyakit Malaria							**	***	****			
Penyakit Diare			**	****	*****							
Penyakit Campak	*										***	****
Kekurangan Pangan								*	**	***	****	*****
Kekurangan air	**				****						**	*****

Dukuhdalem, 28 Februari 2022

Mengetahui,
Kepala Desa


(JUHARI)

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(NURDIN)

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Pada Musim Hujan Banyak Masyarakat terkena wabah DBD	<ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas • Posyandu • Bidan Desa • Posing • Pemberian obat (abate)
2.	Pandemic covid-19 masih mewabah	<ul style="list-style-type: none"> • Vaksinasi • Rumah Sakit • Pencegahan secara ketat • Puskesmas • Pemerintahan Desa
2.	Di tiga dusun pada musim kemarau kekurangan air bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan sumur bor • PAM • Embung desa
3.	Di dusun III terdapat area permukiman rawan longsor jika musim penghujan	<ul style="list-style-type: none"> • TPL • Bronjong • Bantuan pemerintah
4.	Jalan usaha tani masih tanah sehingga pada musim hujan sulit dilalui	<ul style="list-style-type: none"> • Pengerasan • Rabat beton • Bantuan pemerintah
5.	Jalan usaha tani di dusun I terdapat tebing yang jika musim kemarau rawan longsor	<ul style="list-style-type: none"> • TPL • Bronjong • Bantuan pemerintah
6.	Sampah di Bank Sampah Desa tidak bisa dikelola dengan baik dan menimbulkan bau jika terjadi musim hujan	<ul style="list-style-type: none"> • TPS 3 R • Peningkatan sarana dan prasarana

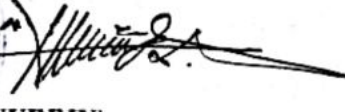
Dukuhdalem, 28 Februari 2022

Mengetahui,

Kepala Desa


 (JUHARI)

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


 (NURDIN)

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI SKETSA DESA

DESA : DUKUHDALAM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT

NO.	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan gang RT. 003 belum diaspal atau rabat beton/tap	<ul style="list-style-type: none">• Bantuan pemerintah• Gotong royong/swadaya
2.	Jalan usaha tani di dusun I (makam panjang) sebagian besar masih tanah	<ul style="list-style-type: none">• Dana Desa• Bantuan pemerintah
3.	Jalan gang di RT. 004 masih tanah	<ul style="list-style-type: none">• Bantuan pemerintah
4.	Jalan usaha tani di Dusun II masih tanah	<ul style="list-style-type: none">• Dana Desa• Bantuan pemerintah
5.	Pengelolaan taman kehati belum maksimal sehingga belum memberikan kontribusi bagi PAD dan masyarakat luas	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan secara mandiri• BUMDesa• Perubahan pengelola secara berkala• Peraturan Desa
6.	Sebagian jalan usaha tani di Dusun III masih tanah	<ul style="list-style-type: none">• Dana Desa• Bantuan pemerintah

7.	Sebagian area permukiman di Dusun III rawan longsor	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan pemerintah
8.	Sarana ibadah (Masjid Desa) belum selesai	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya masyarakat • Bantuan pemerintah • Donatur • Tenaga kerja • DKM • Panitia
9.	Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDTA) belum memiliki fasilitas gedung belajar mengajar	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Dana Desa • Bantuan pemerintah • Donatur • Tenaga kerja • Tanah
10.	Desa belum membangun patok batas desa	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa • Bantuan keuangan provinsi
11.	Penerangan jalan desa penghubung antar dusun belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> • Program Indonesia terang • Dishub • Dana Desa


Mengetahui,
Kepala Desa




(JUHARI)



Dukuhdaleum, 28 Februari 2022
Disusun oleh:
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



(NURDIN)



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

DESA : DUKUHDALAM
 KECAMATAN : JAPARA
 KABUPATEN : KUNINGAN
 PROVINSI : JAWA BARAT

LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
Kelompok Tani	Kegiatan Kelompok tani di Dusun Pakis macet	Lembaga Pengurus Lengkap
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mandiri Sejahter (MS)	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya SDM Pengurus • Kurang Kompaknya Pengurus dalam Menjalankan Usaha BUMDesa • Kurangnya Inovasi Usaha • Keterbatasan Modal Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepengurusan Lengkap • Perlakuan BUMDesa Yang Seajar dengan Badan Usaha Lainnya Milik Pemerintah Dalam Regulasi • Banyak Produk Pertanian Masyarakat yang Bisa Dijadikan Potensi Usaha BUMDesa • Terdapat Program Pemerintah yang Bisa Diakomodir Menjadi Salah Satu Unit Usaha BUMDesa • Terdapat Industri Rumahan/Individu yang Bisa Dikembangkan Dengan Sistem Kerjasama yang Saling Menguntungkan • Kemajuan Teknologi yang Bisa Dimanfaatkan Sebagai Piranti Pengembangan Unit Usaha BUMDesa
Kelompok Tani	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Kelompok Tani Taman Kehati Belum Memberikan Kontribusi Maksimal Terhadap Penghasilan Aset Desa • Kegiatan Kelompok Tani Selain Kelompok Tani Taman Kehati 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Pengurus Lengkap • Lahan Aset Desa yang Dikelola Oleh Kelompok Tani Taman Kehati Cukup Potensial • Terdapat Produk Pertanian yang Bisa

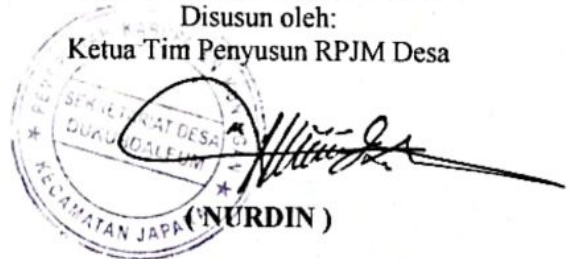
	<p>Relatif Stagnan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Adanya Teknologi Pertanian Yang Mampu Mendorong Daya Produksi Hasil Pertanian • Mahalnya Harga Pupuk • Lemahnya SDM dalam Mengolah Produk Pertanian 	<p>Menjadi Bahan Olahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lahan Pertanian Relatif Subur • Pangsa Pasar yang Relatif Luas Seiring Majunya Teknologi • Terbukanya Bantuan Pemerintah Dalam Hal Fasilitas Pembinaan Kelompok Tani dan Ternak
Koperasi Unit Desa (KUD)	Tidak Adanya Koperasi Unit Desa Yang Bisa Menjadi Lembaga Permodalan Bagi Masyarakat Selain BUMDesa	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Tingginya Gotong Royong/Ras Kebersamaan Masyarakat Sebagai Modal Potensial Untuk Membentuk Koperasi. • Ada Program Pelatihan dan Atau Pembinaan • Potensi Permodalan dari Desa yang Bisa Masuk Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
LPM	Pengurus LPM Sebagian Besar Tidak Tampak Kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus lengkap Tenaga potensial ada • Banyak Potensi Masyarakat Untuk Menjadi Objek Pemberdayaan
PKK	Kegiatan PKK Belum Maksimal Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Keluarga Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus PKK Lengkap • Adanya Lembaga Desa Luar PKK yang Bisa Diajak Kerjasama Dalam Olah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
Karang Taruna dan Remaja Masjid	<ul style="list-style-type: none"> • Jiwa Keagamaan Di Tubuh Remaja Kurang Terpupuk dengan Baik • Kurang Maksimalnya Pembina dalam Memberikan Bimbingan-Bimbingan Baik Untuk Remaja Masjid Maupun Karang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepengurusan Lengkap • Program Pemerintah Desa, Daerah Maupun Pusat Sangat Mendukung Terhadap Kegiatan Pemuda • Kemajuan Teknologi Informasi dan

	<p>Taruna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemajuan Teknologi Kerap Menjadi Masalah Ketimbang Menjadi Solusi dan Kemudahan • Belum Adanya Program Kerja Remaja Masjid Maupun Karang Taruna yang Mampuh Menopang Masa Depan dan Atau Inovasi Penciptaan Lapangan Pekerjaan Akibat Sedikitnya Kesadaran Untuk Menambah Wawasan dan Keilmuan Dalam Diri Mereka 	<p>Komunikasi yang Semakin Canggih Bisa Dijadikan Sarana Kreativitas dan Inovasi Pemuda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Kerja dan Kursus Bisa Disediakan Oleh Pemerintah Desa, Dacrah Maupun Pusat
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mengetahui,
Kepala Desa



Dukuhdalem, 28 Februari 2022
Disusun oleh:
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

DESA : DUKUHDALAM
 KECAMATAN : JAPARA
 KABUPATEN : KUNINGAN
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
1.	Perlunya penambahan ruang belajar TK	Terbatasnya anggaran desa	Tersedianya lahan milik desa untuk lahan pembangunan	Pembangunan secara bertahap	Pembangunan secara bertahap
			<ul style="list-style-type: none"> Adanya kodepikasi anggaran dari dana desa yang bisa dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana TK Potensi swadaya dan donasi tidak mengikat 	<ul style="list-style-type: none"> Penganggaran dari dana desa secara berkelanjutan Jaring donator dan swadaya 	<ul style="list-style-type: none"> Penganggaran dari dana desa secara berkelanjutan Jaring donator dan swadaya
2.	MDTA belum mempunyai gedung/ruang belajar	Terbatasnya anggaran desa	Tersedianya lahan milik desa untuk lahan pembangunan	Pembangunan secara bertahap	Pembangunan secara bertahap
			<ul style="list-style-type: none"> Adanya kodepikasi anggaran dari dana desa yang bisa 	<ul style="list-style-type: none"> Penganggaran dari dana desa secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Penganggaran dari dana desa secara

			<p>dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana MDTA</p> <ul style="list-style-type: none"> Potensi swadaya dan donasi tidak mengikat 	<ul style="list-style-type: none"> Jaring donator dan swadaya 	<p>berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaring donator dan swadaya
3.	<p>Kegiatan pembelajaran SD/PAUD/TK belum didukung dengan alat praktek yang lengkap</p>	<p>Terbatasnya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana</p>	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kodepikasi anggaran dari dana desa yang bisa dialokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana PAUD/TK Bantuan pemerintah (dinas pendidikan) Potensi swadaya dan donasi tidak mengikat Iuran pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan pemerintah/ dinas Penganggaran dari dana desa secara berkelanjutan Jaring donator dan swadaya Iuran pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Pemerintah/Dinas Penganggaran dari dana desa secara berkelanjutan Jaring donator dan swadaya Iuran pembangunan
4.	<p>Belum memiliki lapangan bola voli yang permanen dan status masih kontrak tanah masyarakat/pribadi serta belum sesuai standar kelayakan</p>	<p>Tanah desa kurang strategis untuk dijadikan lapangan bola voly dan keterbatasan anggaran belanja desa untuk pembelian tanah dan pembuatan lapangan bola</p>	<p>Terdapat tanah asset desa di Taman Kehati dan Tanah Asset Desa lainnya seperti bengkok darat</p>	<ul style="list-style-type: none"> Musyawarah penggunaan lahan asset desa di taman kehati dan atau asset desa berupa bengkok darat untuk membangun lapangan bola voli 	<ul style="list-style-type: none"> Musyawarah penggunaan lahan asset desa di taman kehati dan atau asset desa berupa bengkok darat untuk membangun lapangan bola voli

		voly		<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi nggaran belanja desa • Jaring bantuan pemerintah dan donator 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi nggaran belanja desa • Jaring bantuan pemerintah dan donator
5.	Siswa yang berprestasi masih banyak dari golongan keluarga yang lemah secara ekonomi sehingga kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi hingga Universitas relatif sulit	Strata ekonomi masyarakat belum merata	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peluang beasiswa tidak mampu dan • Banyak peluang beasiswa berprestasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi siswa miskin dan berprestasi dengan ketersediaan informasi kesempatan pendidikan gratis • Kerjasama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi • Dorongan beasiswa dari anggaran belanja desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi siswa miskin dan berprestasi dengan ketersediaan informasi kesempatan pendidikan gratis • Kerjasama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi • Dorongan beasiswa dari anggaran belanja desa
6.	PAUD/TK/MDTA/SD belum ditunjang oleh ketersediaan sarana dan sarana perpustakaan yang lengkap	Keterbatasan anggaran belanja desa	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya hibah masyarakat • Bantuan pemerintah • Donasi yang tidak mengikat 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran belanja secara bertahap • Jaring swadaya hibah dari masyarakat • Mengajukan bantuan dari pemerintah • Jaring donator 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran belanja desa secara bertahap • Jaring swadaya hibah dari masyarakat • Mengajukan bantuan dari pemerintah • Jaring donator

7.	Kesejahteraan guru honor masih rendah	Keterbatasan anggaran belanja desa	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan dana desa • Bantuan pemerintah/dinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan dana desa • Bantuan pemerintah/dinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan dana desa • Bantuan pemerintah/dinas
8.	Akses informasi bagi pelayanan masyarakat masih manual	Belum maksimalnya pemanfaatan internet bagi pelayanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya fasilitas jaringan internet yang baik • Tersedianya web gratis • Terdapat banyak media sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi internet murah dengan penyediaan jaringan internet wifi • Pembuatan web desa • Pembuatan akun media sosial desa • Penyediaan sarana dan prasarana untuk akses data ataupun dokumen elektronik desa bagi pelayanan informasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi internet murah dengan penyediaan jaringan internet wifi • Pembuatan web desa • Pembuatan akun media sosial desa • Penyediaan sarana dan prasarana untuk akses data ataupun dokumen elektronik desa bagi pelayanan informasi masyarakat
9.	SDN belum memiliki sarana peribadatan yang memadai	Keterbatasannya bantuan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana dari dinas terkait.	Bantuan Pemerintah atau dinas	Pengajuan bantuan Pemerintah atau dinas	Pengajuan bantuan Pemerintah atau dinas

10.	Fasilitas air bersih MCK SD belum baik	Kurang maksimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana	Bantuan Pemerintah atau dinas	Pengajuan bantuan Pemerintah atau dinas	Pengajuan bantuan Pemerintah atau dinas
11.	Penjaga sekolah belum memiliki ruangan kerja khusus	Keterbatasan lahan dan anggaran	Bantuan Pemerintah atau dinas	Pengajuan bantuan Pemerintah atau dinas	Pengajuan bantuan Pemerintah atau dinas
12.	Tidak semua masyarakat miskin terkaper oleh jaminan sosial/BPJS gratis sehingga menyebabkan ketidakmampuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit secara gratis	Belum maksimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Bantuan Pemerintah atau dinas	Pengajuan bantuan Pemerintah atau dinas	Pengajuan bantuan Pemerintah atau dinas
13.	Bayi atau balita serta ibu hamil belum mendapatkan bantuan makanan tambahan yang bergizi secara maksimal sehingga menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya dalam	Keterbatasan anggaran belanja desa	Terdapat alokasi anggaran dana desa dan infrastruktur perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan program percepatan penanganan stunting sebagai prioritas anggaran belanja desa Maksimalisasi pelayanan kesehatan dasar masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan program percepatan penanganan stunting sebagai prioritas anggaran belanja desa Maksimalisasi pelayanan kesehatan

	penanggulangan stunting			<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalisasi kerjasama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan • Mendorong budaya hidup sehat bagi masyarakat 	<p>dasar masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksimalisasi kerjasama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan • Mendorong budaya hidup sehat bagi masyarakat
14.	Pada musim penghujan penyebaran nyamuk meningkat terutama nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah. Persoalan ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang terkena penyakit demam berdarah.	Kesadaran masyarakat akan pencegahan wabah DBD masih lemah			
15.	Minimnya alokasi dana bagi kegiatan kader kesehatan	Keterbatasan anggaran belanja desa			
16.	Peralatan kesehatan masih kurang lengkap	Keterbatasan anggaran belanja desa			

17.	Perlu adanya kesadaran hidup sehat pada masyarakat	Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan pola hidup sehat dan kurang maksimalnya penyuluhan kesehatan masyarakat			
18.	Fenomena pandemic covid-19 hingga saat ini masih ada.	Kesadaran masyarakat untuk upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 belum maksimal			
19.	Ketersediaan literature buku bacaan SD/TK di perpustakaan masih minim	Bantuan untuk operasional sekolah masih minim			
20.	Minat baca siswa SD masih rendah	Belum maksimalnya bimbingan guru dan orang tua			
21.	Minat baca dan pengetahuan masyarakat Desa masih rendah	Kesadaran penambahan wawasan dan pengetahuan masyarakat lemah dengan alasan kesibukan dan usia			
22.	Perlu adanya sarana dan	Belum teranggarkan dalam			

	prasarana perpustakaan bagi remaja masjid dan majelis-majelis ta'lim	anggaran belanja desa			
23.	Masih ada usia Tua yang hamil	Program KB belum maksimal			
24.	Masyarakat terutama pasangan usia subur banyak yang tidak mau ber KB secara rutin	Program KB belum maksimal			
25.	Tidak adanya pusat informasi lapangan pekerjaan	Belum maksimalnya pemanfaatan jaringan internet			
26.	Pemerintahan desa belum maksimal mengeksplorasi potensi desa dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa	Keterbatasan anggaran belanja desa dan belum maksimalnya pengembangan BUMDesa sebagai pusat perekonomian masyarakat desa			
27.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) belum	Keterbatasan SDM pengurus dan keterbatasan			

	maksimal dan masih terkesan stagnan untuk menjadi pusat kegiatan perekonomian masyarakat desa dan upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan	anggaran dan belanja desa			
28.	Banyak rumah tangga yang miskin	Pemerataan ekonomi masyarakat belum maksimal			
29.	Angka kemiskinan semakin bertambah akibat pandemic covid-19 dan tidak akuratnya data kependudukan	Upaya validasi data belum maksimal sehingga banyak terjadi ketidakcocokan data dan tidak tepat sasaran			
30.	Banyak anggota keluarga yang sulit mencari pekerjaan	Program penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat belum maksimal dan ketersediaan lapangan kerja di luar desa terbatas			

31.	Sarana Ibadah belum terawat dengan baik (Dana pemeliharaan tidak memadai)	Kesadaran gotong royong masyarakat semakin lemah			
32.	Kegiatan-kegiatan sosial keagamaan belum terorganisir dengan baik	Belum terfasilitasi oleh desa secara maksimal			
33.	Seiring perubahan kondisi pemerintahan sekarang, rasa gotong royong masyarakat desa semakin memudar	Efek ketergantungan kepada anggaran dan belanja desa			
34.	Beberapa rumah terancam bahaya longsor	TPL belum terkaper oleh dana desa dikarenakan anggaran dana desa terbatas			
35.	SDM masyarakat desa masih rendah	Tingkat pendidikan masyarakat belum merata			
36.	Belum maksimalnya pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat	Belum maksimalnya peran kader pemberdayaan masyarakat			
37.	Kegiatan olahraga belum	Dikarenakan minimnya			

	terprogram dengan baik	fasilitas olahraga dan belum ada motipator dan pelatih dalam bidang olahraga			
38.	Belum ada upaya pengembangan potensi SDA dan SDM untuk menunjang kegiatan pemuda	Belum adanya pelatihan/peningkatan kapasitas pemuda			
39.	Pembinaan kerohanian generasi muda masih lemah dan tidak terkoordinir	Belum maksimalnya peran tokoh agama dan pendidikan keagamaan			
40.	Asset lahan kebun pemuda terlantar	Kurangnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di tubuh pemuda			
41.	Belum ada kegiatan ekonomi yang dimotori perempuan	Kurang maksimalnya peran kader pemberdayaan perempuan			
42.	Sarana pemerintahan desa belum memadai sehingga berpengaruh terhadap efektivitas kinerja	Keterbatasan anggaran dan belanja desa			

	pemerintahan desa				
43.	Sistem administrasi pemerintahan desa belum keseluruhannya dilaksanakan secara online termasuk di dalamnya pelayanan bagi masyarakat	Belum maksimalnya pemanfaatan jaringan internet			
44.	Perlunya rehabilitasi seluruh TPT jalan Desa	Keterbatasan anggaran dan belanja desa			
45.	Saluran drainase jalan desa sering mampet pada musim hujan	Lemahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan asset desa			
46.	Perlu peningkatan infrastruktur jalan usaha tani sehingga mobilitas masyarakat lebih mudah	Keterbatasan anggaran dan belanja desa			
47.	Masih terdapat jalan gang yang belum diaspal/dirabat beton sehingga belum bias dilalui oleh kendaraan	Keterbatasan anggaran dan belanja desa			
48.	Penanda batas desa belum	Keterbatasan anggaran dan			

	terpasang semua	belanja desa			
49.	Perlu dibangunnya Tanggul Penahan Longsor (TPL) agar tidak mengancam permukiman warga	Keterbatasan anggaran dan belanja desa			
50.	Penerangan lampu jalan desa belum maksimal	Keterbatasan anggaran dan belanja desa			
51.	Pengelolaan sampah keluarga belum maksimal	Keterbatasan anggaran dan belanja desa dan lemahnya kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap pola hidup bersih serta masih lemahnya SDM pengelola Bank Sampah Desa			
52.	Masih banyak kandang ternak warga masih menyatu dengan rumah	Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat			
53.	Tanah milik masyarakat belum seluruhnya memiliki sertifikat bukti kepemilikan	Belum adanya program pembuatan sertifikat massal			

	tanah				
54.	Kepemilikan tanah kas desa belum seluruhnya tersertifikasi	Keterbatasan anggaran dan belanja desa			
55.	Perlu ada sampel pengelolaan usaha bidang pertanian untuk memotifasi masyarakat agar bertani dengan baik	Belum maksimalnya penyuluhan di bidang pertanian			
56.	Perlu percontohan pengelolaan lahan pertanian yang baik	Belum adanya program yang diselenggarakan oleh desa			
57.	Pada musim kemarau sulit untuk bercocok tanam	Lahan pertanian di desa dukuhdalem bersifat tadah hujan.			
58.	Sedikitnya lahan persawahan yang terdapat di Desa Dukuhdalem	Mayoritas lahan perkebunan			
59.	Perlunya dibentuk kelompok-kelompok masyarakat yang perannya	Indikator kemajuan masyarakat dalam ketahanan pangan			

	sebagai motor penggerak bagi masyarakat umum dalam upaya peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat				
60.	Hewan ternak yang sakit diobati masih secara tradisional	Pencegahan wabah penyakit hewan ternak tidak ditanggulangi oleh ahli			
61.	Harga pupuk kimia mahal	Keterbatasan pupuk bersubsidi			
62.	Musim kemarau sering gagal panen karena kekeringan	Lahan tadah hujan dan sulit untuk membangun irigasi perairan			
63.	Banyaknya peralihan fungsi lahan bagi cocok tanam palawija menjadi lahan untuk pohon tebang (Kayu)	Menanam pepohonan untuk pemanfaatan kayu relative mudah dibanding palawija yang perlu pengolahan lahan dengan biaya mahal dan pengurusan secara berkala			

64.	Budidaya ikan air tawar belum maksimal	Keterbatasan tempat, air surut ketika musim kemarau dan keterbatasan SDM dalam budidaya ikan air tawar			
65.	Belum maksimalnya BUMDES dikarenakan kurangan modal untuk pengembangan usaha dan kurangnya SDM pengelola dalam wawasan bisnis/usaha	Keterbatasan anggaran dan belanja desa dan SDM pengelola			
66.	Usaha agroindustri pertanian belum berkembang	Keterbatasan SDM dan lemahnya minat masyarakat			
67.	Belum ada usaha penyedia kebutuhan petani	Lemahnya minat masyarakat			
68.	Belum ada wadah untuk menampung hasil pertanian, usaha kecil dan hasil produk rumah tangga dari masyarakat	Belum maksimalnya peran BUMDesa			
69.	Perlu adanya pelatihan	Belum ada kerjasama antar			

	pengembangan usaha rumahan (<i>home industry</i>)	lembaga dan atau fasilitator pelatihan			
70.	Belum ada wadah untuk memasarkan produk hasil industry rumahan atau masyarakat	Peran BUMDesa belum maksimal			
71.	Produktivitas industry rumahan relative tidak punya daya saing pasar	Belum adanya pelatihan dalam membuat varian produk, pengemasan dan pemasaran			
72.	Potensi wisata taman kehati belum dikelola secara maksimal dan baik.	Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan dana pengembangan dan juga harus ada resolusi tentang pengelolaan taman kehati agar mampu memberikan penghasilan bagi desa, mampu memberdayakan bagi masyarakat luas, dan juga mampu mengangkat nama baik desa.			

73.	Belum tersedianya sarana pentas Budaya Desa	Keterbatasan anggaran dan belanja desa			
74.	Belum terorganisir secara baik kegiatan-kegiatan sosial budaya yang terdapat di tengah masyarakat	Keterbatasan anggaran dan belanja desa			
75.	Sarana linmas perlu pemeliharaan rutin	Keterbatasan anggaran dan belanja desa			
76.	Belum maksimalnya peran linmas	Belum maksimalnya pembinaan			
77.	Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam wawasan kebangsaan dan politik dalam skala desa	Tidak adanya penyuluhan secara berkala			
78.	Saluran air sering mampet oleh sampah	Lemahnya kesadaran masyarakat dalam hal pemeliharaan fasilitas umum			
79.	Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dengan	Perlunya penyuluhan dan pembinaan dalam menciptakan lingkungan			

	baik	yang bersih dan sehat			
80.	Pengelolaan Bank Sampah Unit belum maksimal	Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana			
81.	Areal tanah desa belum dikelola dengan baik	Belum maksimalnya pemanfaatan tanah asset desa			
82.	Banyak keluarga yang seharusnya mendapat subsidi listrik	Penilaian kriteria masyarakat belum begitu tepat sasaran			


Dukuhdalem, 28 Februari 2022

Mengetahui,
Kepala Desa


(JUHARI)

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPALA DESA
DUKUHDALEM
KECAMATAN JAPARA

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(NURDIN)

PEMERINTAH KABUPATEN
SEKRETARIAT DESA
DUKUHDALEM
KECAMATAN JAPARA

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : BUMDES

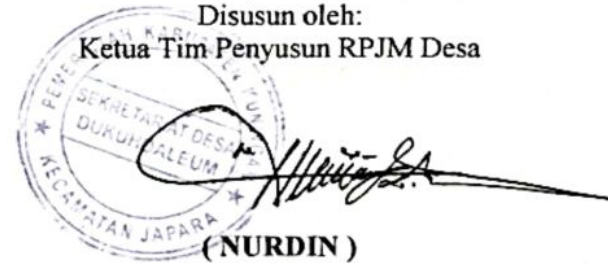
DESA : DUKUHDALAM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki - laki	Perempuan	A-RTM
1	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)						
	- Penambahan Penyertaan Modal	Desa	1 Paket	Paket			
	- Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah Unit)	Desa	1 Paket	Paket			

Mengetahui,
Kepala Desa



Dukuhdalem, 28 Februari 2022
Disusun oleh:
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN I

DESA : DUKUHDALEM
 KECAMATAN : JAPARA
 KABUPATEN : KUNINGAN
 PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki - laki	Perempuan	A-RTM
1.	Dusun I						
	- Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	RT. 001 RW. 001	460 m ²	M			
	- Rehabilitasi Jalan Lingkungan	RT. 002 RW. 001	600 m ²	M			
	- Rehabilitasi Jalan Gang	RT. 002 RW. 001	600 m ²	M			
	- Pengaspalan Jalan Lingkungan	RT. 003 RW. 001	260 m x 2,75 m	M			

	- Pembangunan Jalan Lingkungan (Lanjutan)	RT. 004 RW. 001	380 m2	M			
	- Rehabilitasi Jalan Desa	Dusun I	200 m x 2,7 m	M			
	- Pengerasan Jalan Usaha Tani	Dusun I	3.300 m2	M			


Mengetahui,
Kepala Desa




(JUHARI)



Dukuhdalem, 28 Februari 2022
Disusun oleh:
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



(NURDIN)



DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN II

DESA : DUKUHDALAM
 KECAMATAN : JAPARA
 KABUPATEN : KUNINGAN
 PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki - laki	Perempuan	A-RTM
1.	Dusun II						
	- Pemeluran Jalan Pemakaman dan Jalan Gang	RT. 006 & RT. 007 RW. 002	360 m2	M			
	- Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	Dusun II	600 m2	M			
	- Pengaspalan/Latasir	RT. 007 RW. 002	275 m2	M			
	- Pengaspalan Jalan/Latasir Jalan Desa	RT. 005 RW. 002	300 m x 2,75 m	M			
	- Penerangan Jalan Umum	RT. 006 dan RT. 005 RW. 002	15 Unit	Unit			

	- Pengerasan Jalan Usaha Tani Syaikh Nur'alim	Dusun II	900 m x 3 m	M			
	- Pembangunan Sumur Artesis	Dusun II	150 m	M			
	- Rehabilitasi Posyandu	RT. 006 RW. 002					

Mengetahui,
Kepala Desa



Dukuhdalem, 28 Februari 2022
Disusun oleh:
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN III

DESA : DUKUHDALEM
 KECAMATAN : JAPARA
 KABUPATEN : KUNINGAN
 PROVINSI : JAWA BARAT

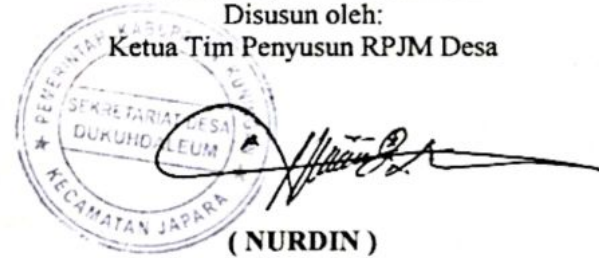
NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki - laki	Perempuan	A-RTM
1.	Dusun III						
	- Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	Dusun III	1.600 m2	M			
	- Pengerasan Jalan Lingkungan	Dusun III	375 m2	M			
	- Pemagaran Halaman Posyandu	RT. 011 RW. 003	20 m2	M			
	- Pembuatan Kanopi Halaman Posyandu	RT. 011 RW. 003	16 M2	M			

	- Pembuatan Sumur Gali	RT. 011 RW. 003	1 Paket	Paket			
	- Pengerasan Jalan Usaha Tani	Dusun III	1.375 m2	M			

Mengetahui,
Kepala Desa



Dukuhdalem, 28 Februari 2022
Disusun oleh:
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : PEMUDA/KARANG TARUNA


DESA : DUKUHDALAM
 KECAMATAN : JAPARA
 KABUPATEN : KUNINGAN
 PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki - laki	Perempuan	A-RTM
1.	Pemuda/Karang Taruna						
	- Pembangunan Lapangan Voley Ball	Dusun I, II dan III	3 Paket	Paket			
	- Pelatihan Keahlian Kerja	Desa	1 Paket	Paket			
	- Pelatihan Bola Voli	Desa	1 Paket	Paket			

Mengetahui,
 Kepala Desa

 (JUHARI)

Dukuhdalem, 28 Februari 2022
 Disusun oleh:
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


 (NURDIN)

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : KADER KESEHATAN/POSYANDU


DESA : DUKUHDALAM
 KECAMATAN : JAPARA
 KABUPATEN : KUNINGAN
 PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki - laki	Perempuan	A-RTM
1.	Kader Kesehatan/Posyandu						
	- Tambahan Anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dan Bumil.	Dusun I, II dan III	3 Paket	Paket			
	-						

Mengetahui,
Kepala Desa


 (JUHARI)

Dukuhdalem, 28 Februari 2022
 Disusun oleh:
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


 (NURDIN)

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : DUKUHDALEM
 KECAMATAN : JAPARA
 KABUPATEN : KUNINGAN
 PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki - laki	Perempuan	A-RTM
1.	Dusun I						
	- Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	RT. 001 RW. 001	460 m ²	M			
	- Rehabilitasi Jalan Lingkungan	RT. 002 RW. 001	600 m ²	M			
	- Rehabilitasi Jalan Gang	RT. 002 RW. 001	600 m ²	M			
	- Pengaspalan Jalan Lingkungan	RT. 003 RW. 001	260 m x 2,75 m	M			
	- Pembangunan Jalan Lingkungan (Lanjutan)	RT. 004 RW. 001	380 m ²	M			
	- Rehabilitasi Jalan Desa	Dusun I	200 m x 2,7 m	M			
	- Pengerasan Jalan Usaha Tani	Dusun I	3.300 m ²	M			
2.	Dusun II						
	- Pemeluran Jalan Pemakaman dan Jalan Gang	RT. 006 & RT. 007 RW. 002	360 m ²	M			

	- Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	Dusun II	600 m2	M			
	- Pengaspalan/Latasir	RT. 007 RW. 002	275 m2	M			
	- Pengaspalan Jalan/Latasir Jalan Desa	RT. 005 RW. 002	300 m x 2,75 m	M			
	- Penerangan Jalan Umum	RT. 006 dan RT. 005 RW. 002	15 Unit	Unit			
	- Pengerasan Jalan Usaha Tani Syaikh Nur'alim	Dusun II	900 m x 3 m	M			
	- Pembangunan Sumur Artesis	Dusun II	150 m	M			
	- Rehabilitasi Posyandu	RT. 006 RW. 002					
3.	Dusun III						
	- Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	Dusun III	1.600 m2	M			
	- Pengerasan Jalan Lingkungan	Dusun III	375 m2	M			
	- Pemagaran Halaman Posyandu	RT. 011 RW. 003	20 m2	M			
	- Pembuatan Kanopi Halaman Posyandu	RT. 011 RW. 003	16 M2	M			
	- Pembuatan Sumur Gali	RT. 011 RW. 003	1 Paket	Paket			
	- Pengerasan Jalan Usaha Tani	Dusun III	1.375 m2	M			
4.	Pemuda/Karang Taruna						
	- Pembangunan Lapangan Voley Ball	Dusun I, II dan III	3 Paket	Paket			
	- Pelatihan Keahlian Kerja	Desa	1 Paket	Paket			

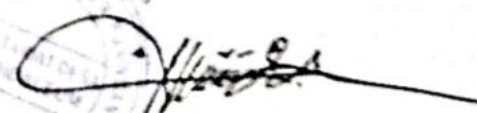
	- Pelatihan Bola Voli	Desa	1 Paket	Paket			
5.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)						
	- Penambahan Penyertaan Modal	Desa	1 Paket	Paket			
	- Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah Unit)	Desa	1 Paket	Paket			
6.	Kader Posyandu						
	- Tambahan Anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dan Bumil.	Dusun I, II dan III	3 Paket	Paket			
7.	Kelompok Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK)						
	- Pelatihan Tata Boga dan Rias	Desa	2 Paket	Paket			

Mengetahui,
Kepala Desa


(JUHARI)

Dukuhdalem, 28 Februari 2022

Disusun oleh:
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(NURDIN)

**RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : 2022 - 2027**

DESA : Dukuhdalem
KECAMATAN : Japara
KABUPATEN : Kuningan
PROVINSI : Jawa Barat

No	Bidang/Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	Thn 6	Jth (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjas ama tata ruah	Kerjas ama tata ruah
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	6 Tahun	Peningkatan kinerja aparatur	√	√	√	√	√	√	336,635,200	ADD, PAD, IP, PARET dan DO	√		
				Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	6 Tahun	Peningkatan kinerja aparatur	√	√	√	√	√	√	1,993,512,000	ADD, PAD, IP, PARET dan DO	√		
				Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	6 Tahun	Peningkatan kinerja aparatur	√	√	√	√	√	√	8,712,000	ADD	√		
				Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	Desa	6 Tahun	Efektivitas roda pemerintahan desa	√	√	√	√	√	√	300,147,756	ADD, PAD, IP, PARET dan DO	√		
				Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	6 Tahun	Peningkatan kinerja BPD	√	√	√	√	√	√	127,200,000	ADD, PAD, IP dan DO	√		
				Penyediaan Insentif RT/RW	Desa	6 Tahun	Peningkatan kinerja RT/RW	√	√	√	√	√	√	79,200,000	ADD dan DO	√		
				Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Desa	Desa	6 Tahun	Efektivitas roda pemerintahan desa	√	√	√	√	√	√	155,346,000	ADD, PAD dan DO	√		
				Tata Kelola Pertanahan	Desa	6 Tahun	Pengelolaan Aset Desa dan Pengelolaan Pertanahan Desa Yang	√	√	√	√	√	√	146,370,000	ADD dan DO	√		
				Pemeliharaan Gedung Balai Desa	Desa	6 Tahun	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Desa	√	√	√	√	√	√	30,000,000	ADD, PAD dan Paret	√		
				Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Desa	6 Tahun	Pemeliharaan aset Desa	√	√	√	√	√	√	7,200,000	ADD, PAD dan Paret	√		
				Pengadaan dan Pemeliharaan Komputer	Desa	6 Tahun	Pemeliharaan aset Desa	√	√	√	√	√	√	121,000,000	ADD, Paret dan DO	√		

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
				Pengelolaan Aset Desa	Desa	6 Tahun	Pemeliharaan aset Desa	√	√	√	√	√	√	15,000,000	ADD dan PAD	√		
				Pembangunan Gedung Serba Guna	Desa	6 Tahun	Sarana dan Prasarana Kantor Desa	√	√	√				500,000,000	ip	√		
Jumlah Per Bidang 1														3,820,322,956				
2	Pembangunan Desa	a.	Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/MDTA	Ds. I - Ds. III	6 Tahun	Pelayanan pendidikan dasar	√	√	√	√	√	√	245,190,000	DD	√		
				Pembangunan Gedung TK	Ds. I	2 Unit	Penyediaan sarana pendidikan dasar yang baik			√	√	√	√	300,000,000	DD	√		
				Pemagaran Halaman PAUD	Ds. III	20 m	Peningkatan sarana pendidikan dasar		√					23,199,000	DD	√		
				Pembuatan Kanopi Halaman PADU	Ds. III	16 m	Peningkatan sarana pendidikan dasar			√				8,525,000	DD	√		
				Pembuatan Sumur Gali PAUD	Ds. III	1 Buah	Peningkatan sarana pendidikan dasar			√				3,500,000	DD	√		
		b.	Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu	Ds. I, II dan III	6 Tahun	Pelayan kesehatan dasar masyarakat	√	√	√	√	√	√	233,100,000	DD dan IP	√		
		c.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehab TPT Jalan Lingkungan	RT. 001	460 m2	Kelancaran Transfortasi		√					32,000,000	DD	√		
				Rehab TPT Jalan Lingkungan	RT. 002	600 m2	Kelancaran Transfortasi		√					41,250,000	DD	√		
				Rehab Jalan Gang	RT. 002	260 m2	Kelancaran Transfortasi		√					28,490,000	DD	√		
				Pengaspalan Jalan Lingkungan	RT. 003	380 m2	Kelancaran Transfortasi		√					20,000,000	DD			√
				Pembuatan Jalan Lingkungan (Lanjutan)	RT. 004	200 m	Kelancaran Transfortasi			√				50,000,000	DD	√		
				Rehabilitasi TPT Jalan Desa	Ds. I	650 m2	Kelancaran Transfortasi			√				43,890,000	DD	√		
				Pengerasan Jalan Usaha Tani	Ds. I	3500 m2	Mobilitas pertanian masyarakat				√	√	√	211,000,000	DD, APBD	√		√
				Pemeluran Jalan Kuburan dan Gang	RT. 006 dan 008	360 m2	Kelancaran mobilitas masyarakat			√				53,790,000	DD	√		
				Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	Ds. I	600 m	Peningkatan kelompok tani				√			30,000,000	DD	√		
				Pengaspalan/Latasir	RT. 008	275 m2	Peningkatan pertanian masyarakat				√			19,000,000	DD			√

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
				Pengaspalan/Latasir Jalan Desa	Ds. I	825 m2	Sarana dan prasarana kegiatan masyarakat dusun				√			57,000,000	DD			√
				Pengerasan Jalan Usaha Tani	Dusun II	2.700 m2	Mobililitas pertanian masyarakat'				√	√	√	135,000,000	DD, APBD, IP	√		√
				Pembangunan Sumur Artesis	Ds. II	150 m	Pengadaan sumber air bersih bagi masyarakat					√		600,000,000	DD, APBD, APBN			√
				Rehabilitasi Posyandu	Dusun II	1 paket	Penyediaan sarana pelayanan kesehatan dasar			√				50,000,000	DD, APBD	√		
				Pembangunan Lapangan Bola Voli	Ds. I, II dan III	3 paket	Penyediaan sarana olahraga masyarakat			√	√	√	√	300,000,000	DD, APBD, APBN	√		
				Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	Dusun III	1.600 m2	Kelancaran Transfortasi			√				34,408,000	DD, APBD	√		
				Pengerasan Jalan Lingkungan	Dusun III	375 m2	Kelancaran Transfortasi				√			61,226,000	DD, APBD	√		
				Pengerasan Jalan Usaha Tani	Dusun III	1.375 m2	Mobililitas pertanian masyarakat'				√	√	√	75,000,000	DD, APBD	√		√
				Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Desa	6 Tahun	Penyelenggaraan desa bersih	√	√	√	√	√	√	10,800,000	DD		√	
		d.	Perhubungan, Komunikasi dan	Penyelenggaraan Informasi Publik	Desa	6 Tahun	Transfaransi penyelenggaraan pemerintahan desa	√	√	√	√	√	√	18,000,000	DD, IP		√	
				Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa	6 Tahun	Tersedianya jaringan komunikasi dan informasi lokal desa yang baik	√	√	√	√	√	√	36,000,000	DD		√	
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Desa	6 Tahun	Terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi milik desa	√	√	√	√	√	√	6,960,000	DD		√	
				Penerangan Jalan Umum	Ds. I	10 unit	Kelancaran Transfortasi			√				75,000,000	DD, APBD	√		√
				Penerangan Jalan Umum	Ds. II	15 Unit	Kelancaran Transfortasi						√	112,500,000	DD, APBD	√		√
Jumlah Per Bidang 2														2,914,828,000				
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	LINMAS	Peningkatan Kapasitas Linmas	Ds. I,II, dan III	6 Tahun	Peningkatan keamanan oleh desa	√	√	√	√	√	√	35,910,000	DD		√	
		b.	KEAGAMAAN/NASIONAL	PHBN dan PHBI	Desa	6 Tahun	Memupuk jiwa keagamaan dan nasionalisme masyarakat	√	√	√	√	√	√	73,500,000	DD		√	
		c.	KEPEMUDAAN	Pembinaan Kepemudaan	Desa	6 Tahun	Membina generasi muda	√	√	√	√	√	√	22,800,000	DD		√	
Jumlah Per Bidang 3														132,210,000				

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Desa	6 Tahun	Desa swasembada pangan dengan adanya lumbung desa	√	√	√	√	√	√	934,248,000	DD	√		
		b.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa	6 Tahun	Meningkatnya SDM Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	206,442,000	DD	√		√
				Peningkatan Kapasitas BPD	Desa	6 Tahun	Meningkatnya SDM BPD	√	√	√	√	√	√	40,200,000	DD, IP	√		√
		c.	Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan	Desa	6 Tahun	Meningkatnya kapasitas PKK	√	√	√	√	√	√	118,995,000	DD, IP	√		
Jumlah Per Bidang 4													1,299,885,000					
5	Penanggulangan Bencana	a.	Penanganan Darurat Desa	Penanganan Darurat Desa	Desa	6 Tahun	Meningkatkan kewaspadaan desa	√	√	√	√	√	√	362,520,000	DD	√		
		b.	Penanganan Mendesak Desa'	Penanganan Mendesak Desa'	Desa	6 Tahun	Penanganan Mendesak Desa'	√	√	√	√	√	√	2,008,800,000	DD	√		
Jumlah Per Bidang 4													2,371,320,000					
JUMLAH TOTAL													10,538,565,956					





KEPALA DESA DUKUHDALAM
KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN

Dukuhdalem, 23 September 2022

Nomor : 141/53/IX/2022/Pem
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Musrenbangdes
Untuk Tahun 2024

Kepada
Yth. 1. Ketua BPD Beserta Anggota
2. Ketua LPM Beserta Anggota
3. Ketua TP PKK Beserta Anggota
4. Ketua RT
5. Tokoh Masyarakat
6. Perangkat Desa
7. Pendamping desa
Di

Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, Sehubungan akan dilaksanakannya Musrenbangdes untuk Tahun 2024, Maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk hadir dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari : Senin
Tanggal : 26 September 2022
Waktu : Pukul 08.00 Wib
Tempat : Aula Balai Desa Dukuhdalem.

Demikian undangan ini kami sampaikan dan mohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr/i dapat hadir tepat pada waktunya, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Dukuhdalem



Tembusan:
1. Yth: Bapak Camat Japara

PETA DESA DUKUHDALAM



Mengetahui,
Kepala Desa



Dukuhdalem, 28 Februari 2022
Disusun oleh:
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

